

DATA DAN INFORMASI KOTA DUMAI 2012 - 2016



DATA DAN INFORMASI KOTA DUMAI 2012 - 2016



KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, secara umum, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan tersebut selalu termuat baik secara langsung maupun tidak langsung didalam dokumen rencana pembangunan daerah baik dalam skala nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dalam berbagai ungkapan yang tercantum baik dalam visi, misi, tujuan ataupun sasaran dokumen rencana pembangunan itu sendiri.

Dokumen rencana pembangunan merupakan sebuah kajian strategis yang didasarkan pada kondisi ataupun fakta yang menunjukkan kekhasan suatu daerah yang pada akhirnya digunakan untuk merumuskan cita-cita yang ingin dicapai atau kondisi yang ingin dirubah ke arah yang lebih baik. Kondisi dan fakta yang menjadi dasar kajian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah tersebut sangat memainkan peranan penting dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan dokumen rencana pembangunan daerah.

Kondisi dan fakta yang menggambarkan situasi suatu lokus perencanaan dapat berwujud dalam kumpulan data-data dan informasi pembangunan. Efektif dan efisiennya hasil dokumen rencana pembangunan sangat dipengaruhi oleh data-data dan informasi yang menjadi referensi yang mampu menggambarkan kondisi kekinian lokus tersebut.

Buku data dan informasi pembangunan kota Dumai tahun 2016 ini menyajikan data-data pembangunan dan informasi secara umum dalam perspektif perencanaan kewilayahan kota Dumai yang dibagi menjadi data-data lingkup Profil Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan, Profil ekonomi wilayah dan sarana dan prasarana wilayah.

Data-data dan informasi ini juga menggunakan analisa perspektif perencanaan kewilayahan untuk menterjemahkan informasi yang berasal dari data-data yang tersaji dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah Kota Dumai.

Perhitungan dan interpretasi data pada buku ini, secara umum banyak merujuk pada buku *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan* karangan Luthfi Muta'ali yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Geografi (BFG) Universitas Gadjah mada Yogyakarta pada tahun 2015.

Semoga buku ini dapat memberikan informasi yang jelas terkait data-data makro pembangunan kota Dumai.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Grafik.....	
Bab I Pendahuluan.....	1
1 Latar belakang.....	1
2 Tujuan.....	1
3 Metodologi.....	2
4 Sistematika Penulisan.....	3
Bab II Profil Wilayah Kota Dumai	1
1 Kondisi Umum Berdasarkan Kecamatan.....	2
2 Kondisi Topografi Kota Dumai.....	16
3 Kondisi Klimatologi Kota Dumai.....	18
4 Kondisi Geologi Kota Dumai.....	20
5 Kondisi Hidrologi Kota Dumai.....	22
6 Kategori Pemanfaatan Lahan di Kota Dumai.....	23
7 Potensi Pengembangan Wilayah.....	28
8 Wilayah Rawan Bencana.....	31
Bab III Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	1
1 Kependudukan.....	1
2 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk.....	1
3 Sex Ratio Penduduk Kota Dumai.....	4
4 Dependancy Ratio.....	7
5 Indeks Redistribusi dan Konsentrasi Penduduk.....	11
6 Ketenaga Kerjaan.....	15
7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	17
8 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	19
9 Kemiskinan.....	21
10 Daya Dukung Demografis.....	26
Bab IV Profil Ekonomi.....	1
1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	2
3 Analisis Struktur dan Transformasi (Pergeseran) Ekonomi Wilayah.....	4
4 Struktur Perekonomian Regional (Share Regional)	4
5 Struktur Perekonomian Sektoral (Share Sektoral)	6
6 Transformasi Ekonomi Wilayah.....	9
7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan.....	12
8 Analisis Pertumbuhan Ekonomi.....	15
9 Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Analisis Kebutuhan Investasi.....	19

10	Analisis Tipologi Klassen.....	22
11	Analisis Sektor Basis.....	24
12	Indek Kontribusi Sektoral.....	24
13	Analisis Location Quotient (LQ)	26
14	Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)	31
15	Analisis Gabungan LQ dan DLQ.....	36
Bab V	Sarana dan Prasarana.....	1
1	Fasilitas pelayanan pendidikan.....	1
2	Fasilitas pelayanan kesehatan.....	7
	Daftar Pustaka.....	1
	Lampiran.....	1

DAFTAR TABEL

Bab I	Pendahuluan	
	1.1 Metode Penyusunan Buku	1
Bab II	Profil Wilayah Kota Dumai	
	2.1. Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Dumai	1
	2.2. Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai	19
	2.3. Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016	
	2.4. Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016	19
	2.5. Sungai yang Terdapat di Kota Dumai	23
	2.6. Banyaknya Kejadian Asap di Kota Dumai	32
Bab III	Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan	
	3.1. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Dumai per Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2016	2
	3.2. Perbandingan antara Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Tahun 2016	5
	3.3. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur per kecamatan tahun 2016	8
	3.4. Perhitungan Indeks Redistribusi dan Konsentrasi Penduduk Kota Dumai Tahun 2016	13
	3.5. Kondisi Ketenaga Kerjaan Kota Dumai Tahun 2016	17
	3.6. Tingkat Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2016	
	3.7. Analisa Daya Dukung Demografis Kecamatan se-Kota Dumai Tahun 2016	22
	3.8. Analisa Daya Dukung Demografis Kecamatan se-Kota Dumai Tahun 2016	27
Bab IV	Profil Ekonomi	
	4.1. PDRB ADHB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	3
	4.2. Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016	5
	4.3. Struktur Perekonomian Sektoral (<i>Share Sektoral</i>) Kota Dumai Tahun 2012-2016	7
	4.4. Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2012-2016 Berdasarkan 3 (Tiga) Kelompok Sektor Utama	10
	4.5. PDRB ADHK 2010 Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	13

4.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016	16
4.7.	PDRB ADHK 2010 Kota Dumai Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2012-2016	21
4.8.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) dan Kebutuhan Investasi Kota Dumai Tahun 2012-2016	22
4.9.	Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	23
4.10.	Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah	23
4.11.	Potensi Sektor Andalan/Basis Kota Dumai Tahun 2012-2016	25
4.12.	Penafsiran Nilai LQ	26
4.13.	Nilai LQ Sektor-Sektor Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016	28
4.14.	Penafsiran Sektor Basis Kota Dumai Tahun 2012-2013 Berdasarkan Analisis LQ	29
4.15.	Penafsiran Sektor Basis Kota Dumai Tahun 2014-2016 Berdasarkan Analisis LQ	30
4.16.	Nilai DLQ Sektor-sektor Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016	32
4.17.	Penafsiran Sektor Basis Kota Dumai Tahun 2012-2016 Berdasarkan Nilai DLQ	33
4.18.	Tipologi Sektor Berdasarkan Nilai LQ dan DLQ	36
4.19.	Analisis Gabungan LQ dan DLQ Kota Dumai Tahun 2012-2016	36

Bab V Sarana dan Prasarana

5.1.	Kriteria Penentuan Fasilitas Pelayanan Lingkungan Permukiman Bidang Pendidikan	2
5.2.	Kecukupan fasilitas Sekolah Dasar di Kota Dumai berdasarkan SNI 03-1773-2004	4
5.3.	Kecukupan fasilitas Sekolah Menengah Pertama di Kota Dumai berdasarkan SNI 03-1773-2004	5
5.4.	Kecukupan fasilitas Sekolah Menengah Atas di Kota Dumai berdasarkan SNI 03-1773-2004	6
5.5.	Kriteria Penentuan Fasilitas Pelayanan Lingkungan Permukiman Bidang Kesehatan	7
5.6.	Kecukupan fasilitas Kesehatan di Kota Dumai berdasarkan SNI 03-1773-2004	9

DAFTAR GRAFIK

Bab II Profil Wilayah Kota Dumai

- | | | |
|------|-----------------------------------------------------------|----|
| 2.1. | Persentase Luas Wilayah Dumai Timur Menurut Kelurahan | 4 |
| 2.2. | Persentase Luas Wilayah Dumai Barat Menurut Kelurahan | 6 |
| 2.3. | Persentase Luas Wilayah Bukit Kapur Menurut Kelurahan | 8 |
| 2.4. | Persentase Luas Wilayah Sungai Sembilan Menurut Kelurahan | 10 |
| 2.5. | Persentase Luas Wilayah Medang Kampai Menurut Kelurahan | 12 |
| 2.6. | Persentase Luas Wilayah Dumai Kota Menurut Kelurahan | 14 |
| 2.7. | Persentase Luas Wilayah Dumai Selatan Menurut Kelurahan | 16 |

Bab III Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. | Perbandingan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2010 dan Tahun 2016 | 3 |
| 3.2. | Perbandingan jumlah Penduduk laki-laki dan perempuan Kota Dumai Tahun 2016 | 7 |
| 3.3. | Struktur Penduduk Kota Dumai Tahun 2016 | 11 |
| 3.4. | Distribusi Penduduk Kota Dumai Tahun 2016 | 15 |
| 3.5. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Dumai Tahun 2010- 2016 | 19 |
| 3.6. | Grafik Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012-2016 | 25 |
| 3.7. | Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011-2016 (%) Kota Dumai vs Provinsi Riau | 26 |

Bab IV Profil Ekonomi.....

- | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. | Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016 | 5 |
| 4.2. | Struktur Perekonomian Regional (<i>Share Regional</i>) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2012-2016 | 6 |
| 4.3. | Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2012-2016 (%) | 8 |
| 4.4. | Pergeseran Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016 (%) | 11 |

4.5.	Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai Tahun 2016	14
4.6.	Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kota Dumai Tahun 2010-2016	15
4.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2016 Kota Dumai VS Provinsi Riau	18

BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dokumen rencana pembangunan merupakan sebuah kajian strategis yang didasarkan pada kondisi ataupun fakta yang menunjukkan kekhasan suatu daerah yang pada akhirnya digunakan untuk merumuskan cita-cita yang ingin dicapai atau kondisi yang ingin dirubah ke arah yang lebih baik. Kondisi dan fakta yang menjadi dasar kajian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah tersebut sangat memainkan peranan penting dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan dokumen rencana pembangunan daerah.

Kondisi dan fakta yang menggambarkan situasi suatu lokus perencanaan dapat berwujud dalam kumpulan data-data dan informasi pembangunan. Efektif dan efisiennya hasil dokumen rencana pembangunan sangat dipengaruhi oleh data-data dan informasi yang menjadi referensi yang mampu menggambarkan kondisi kekinian lokus tersebut.

TUJUAN

Tujuan penulisan Buku data dan informasi pembangunan kota Dumai tahun 2016 ini adalah untuk menyajikan data-data pembangunan dan informasi secara umum dalam perspektif perencanaan kewilayahan kota Dumai yang dibagi menjadi data-data lingkup Profil Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan, Profil ekonomi wilayah dan sarana dan prasarana wilayah. Data-data dan informasi ini juga menggunakan analisa perspektif perencanaan kewilayahan untuk menterjemahkan informasi yang berasal dari data-data yang

tersaji dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik dan Perangkat daerah Kota Dumai.

METODOLOGI

Buku Data dan Data Kota Dumai Tahun 2016 ini disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Tabel 1.1 Metode Penyusunan Buku

METODE		HASIL
ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN		
	Analisis Komposisi Penduduk	Komposisi Penduduk, Sex Ratio, Dependency Ratio, Child to Old Ratio
	Analisis Kepadatan dan Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk, Indeks Redistribusi dan Konsentrasi
	TPAK & TPT	Analisis Ketenagakerjaan
ANALISIS EKONOMI		
	Tipologi Klassen	Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi
	Indeks Kontribusi Sektoral	Potensi Sektor Andalan
	Analisis Gabungan LQ dan DLQ	Sektor Basis
	Analisis Kemiskinan	Angka Kemiskinan
	Analisis Ekonomi Wilayah	Pendapatan Perkapita, Produktivitas Sektoral, Struktur dan Transformasi Ekonomi Wilayah, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Produktivitas Ekonomi, ICOR, Analisis Kebutuhan Investasi
ANALISIS SARANA DAN PRASARANA		
	Metode SNI	Ketersediaan Sarana dan Fasilitas

METODE		HASIL
		Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan
ANALISIS DAYA DUKUNG		
	Daya Dukung Demografis	Kapasitas Tampung Wilayah

SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Latar belakang

Tujuan

Metodologi

Bab II Profil Wilayah Kota Dumai

Kondisi Umum Berdasarkan Kecamatan

Kondisi Topografi Kota Dumai

Kondisi Klimatologi Kota Dumai

Kondisi Geologi Kota Dumai

Kondisi Hidrologi Kota Dumai

Kategori Pemanfaatan Lahan di Kota Dumai

Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Rawan Bencana

Bab III Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kependudukan

Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk

Sex Ratio Penduduk

Dependancy Ratio

Indeks Redistribusi dan Konsentrasi

Ketenaga Kerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemiskinan

Daya Dukung Demografis

Bab IV Profil Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Analisis Struktur dan Transformasi (Pergeseran)

Ekonomi Wilayah

Struktur Perekonomian Regional (Share Regional)

Struktur Perekonomian Sektoral (Share Sektoral)

Transformasi Ekonomi Wilayah

PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan

Analisis Kebutuhan Investasi

Analisis Tipologi Klassen

Analisis Sektor Basis

Indek Kontribusi Sektoral

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis Gabungan LQ dan DLQ

Bab V Sarana dan Prasarana

Fasilitas pelayanan pendidikan

Fasilitas pelayanan kesehatan

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

PROFIL WILAYAH KOTA DUMAI



PROFIL DAERAH KOTA DUMAI

Kota Dumai termasuk salah satu kota yang ada di Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya pada tahun 2009, Mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Seiring perkembangan Kota Dumai, saat ini terdapat 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Dumai

No	Wilayah Administrasi		No	Wilayah Administrasi	
	Kecamatan	Kelurahan		Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bagan Besar	5	Dumai Timur	Bukit Batrem
		Kayu Kapur			Buluh Kasap
		Bukit Nenas			Jaya Mukti
		Gurun Panjang			Tanjung Palas
		Kampung Baru			Teluk Binjai
2	Dumai Barat	Bagan Keladi	6	Dumai Selatan	Bukit Datuk
		Pangkalan Sesai			Bukit Timah
		Purnama			Bumi Ayu
		Simpang Tetap Darul Ichsan			Mekar Sari
3	Dumai Kota	Bintan	7	Sungai Sembilan	Ratu Sima
		Dumai Kota			Bangsai Aceh
		Laksamana			Basilam Baru
		Rimba Sekampung			Batu Teritip
4	Medang Kampai	Sukajadi			Lubuk Gaung
		Guntung			Tanjung
		Mundam			Penyembal
		Pelintung			
		Teluk Makmur			

Sumber: diolah dari Dumai Dalam Angka, 2017

Kota Dumai memiliki luas daratan 204.674 (dua ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar dengan persentase luas per kecamatan seperti terlihat pada Gambar 2.1. Memiliki wilayah perairan seluas 71.393 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar. Secara geografis terletak pada posisi antara $101^{\circ} 0' 38''$ - $101^{\circ} 43' 33''$ Bujur Timur, $01^{\circ} 26' 50''$ - $02^{\circ} 15' 40''$ Lintang Utara. Secara administratif seperti yang dapat dilihat Kota Dumai berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Selat Rupat, Pulau Rupat, dan Selat Malaka
- Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir

Secara administrasi Kota Dumai dikepalai oleh seorang Walikota dengan seorang Wakil Walikota. Didalam melaksanakan tugasnya, dibantu Sekretariat Daerah, Inspektorat dan 22 Dinas dan Badan serta 8 kantor pelayanan masyarakat, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai.

I. Kondisi Umum Berdasarkan Kecamatan

Untuk penjelasan umum berdasarkan masing-masing Profil Kecamatan yang dibagi menjadi 7 kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Dumai Timur

Berdasarkan posisi geografisnya, Dumai Timur memiliki batas-batas: Utara – Selat Rupat; Selatan – Kec. Bukit Kapur; Barat Kec. Dumai Kota; Timur – Kec. Medang Kampai. Kecamatan Dumai Timur terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Tanjung Palas.
- Kelurahan Jaya Mukti
- Kelurahan Teluk Binjai
- Kelurahan Buluh Kasap
- Kelurahan Bukit Batrem

Kecamatan Dumai Timur merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Dumai dengan luas daratan 47,52 km². Letak Kecamatan Dumai Timur tepat berada di tengah Kota Dumai dengan ibukota kecamatan Kelurahan Teluk Binjai.

Karakteristik wilayah Kecamatan Dumai Timur menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0–1 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Wilayah yang berbatasan langsung dengan laut atau daerah pesisir pantai yaitu Kelurahan Buluh Kasap dan Kelurahan Tanjung Palas, sedangkan kelurahan lainnya bukan daerah pesisir pantai.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumai Timur memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Medang Kampai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Bukit Kapur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Dumai Kota dan Kec. Dumai Selatan.

Setelah pemekaran wilayah di Kecamatan Dumai Timur secara proses administrasi pemerintahan, terdiri dari 5 kelurahan yang memanjang dari utara ke selatan, yaitu Buluh Kasap, Teluk Binjai, Jaya Mukti, Tanjung Palas, dan Bukit

Batrem masing- masing dengan luas daratan 4,50 km², 12,02 km², 3,90 km², 26,00 km², dan 1,10 km².

Grafik 2.1 Persentase Luas Wilayah Dumai Timur Menurut Kelurahan



Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Dumai Timur tahun 2016 terbagi dalam wilayah 5 kelurahan dan 88 rukun tetangga (RT) dengan rincian per kelurahan sebagai berikut:

- Kelurahan Tanjung Palas terdiri dari 13 RT.
- Kelurahan Jaya Mukti terdiri dari 23 RT.
- Kelurahan Teluk Binjai terdiri dari 20 RT.
- Kelurahan Buluh Kasap terdiri dari 17 RT.
- Kelurahan Bukit Batrem terdiri dari 15 RT.

2. Kecamatan Dumai Barat

Berdasarkan posisi geografisnya, Dumai Barat memiliki batas-batas: Utara – Selat Rupat; Selatan – Kecamatan Dumai Selatan; Barat – Sei. Mesjid (Kecamatan Sungai Sembilan); Timur – Dumai Kota. Kecamatan Dumai Barat terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Pangkalan Sesai;
- Kelurahan Purnama;
- Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan;
- Kelurahan Bagan Keladi.

Kecamatan Dumai Barat merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Dumai dengan luas daratan 44,98 km². Letak Kecamatan Dumai Barat tepat berada di barat Kota Dumai dengan ibu kota kecamatan Purnama.

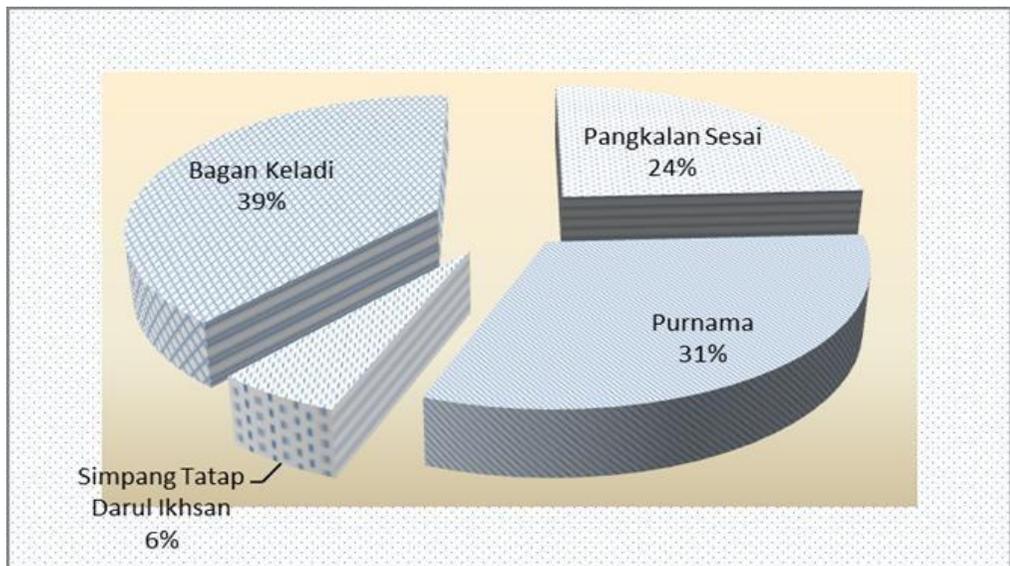
Karakteristik wilayah Kecamatan Dumai Barat menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0 – 3 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Dua wilayah yang berbatasan langsung dengan laut atau daerah pesisir pantai yaitu Kelurahan Purnama dan Kelurahan Pangkalan Sesai.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumai Barat memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dumai Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sei. Mesjid (Kecamatan Sungai Sembilan).

Setelah pemekarkan wilayah administrasi pemerintahan, Kecamatan Dumai Barat menjadi 4 kelurahan yang memanjang dari timur ke barat, yaitu Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Bagan Keladi dan Purnama masing-masing dengan luas daratan 13,82 km²; 3,16 km²; 10,0 km² dan 18,00 km².

Grafik 2.2 Persentase Luas Wilayah Dumai Barat Menurut Kelurahan



Sumber: diolah dari Dumai Dalam Angka, 2017

Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Dumai Barat tahun 2016 terbagi dalam wilayah 4 kelurahan, tidak terdapat rukun warga (RW), dan 69 rukun tetangga (RT) dengan rincian per kelurahan sebagai berikut:

- Kelurahan Pangkalan Sesai terdiri dari 16 RT;
- Kelurahan Purnama terdiri dari 25 RT;
- Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan terdiri dari 14 RT;
- Kelurahan Bagan Keladi terdiri dari 14 RT.

3. Kecamatan Dumai Bukit Kapur

Berdasarkan posisi geografisnya, Bukit Kapur memiliki batas-batas: Utara – Kec. Dumai Selatan; Selatan – Kabupaten Bengkalis; Barat – Kabupaten Rokan Hilir; Timur – Kec. Medang Kampai Kecamatan Bukit Kapur terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Bukit Nenas
- Kelurahan Bagan Besar
- Kelurahan Bukit Kayu Kapur
- Kelurahan Gurun Panjang
- Kelurahan Kampung baru

Kecamatan Bukit Kapur merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Dumai dengan luas daratan 200 km². Letak Kecamatan Bukit Kapur tepat berada di selatan Kota Dumai dengan ibukota kecamatan Bukit Nenas.

Karakteristik wilayah Kecamatan Bukit Kapur menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 3 – 10 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar.

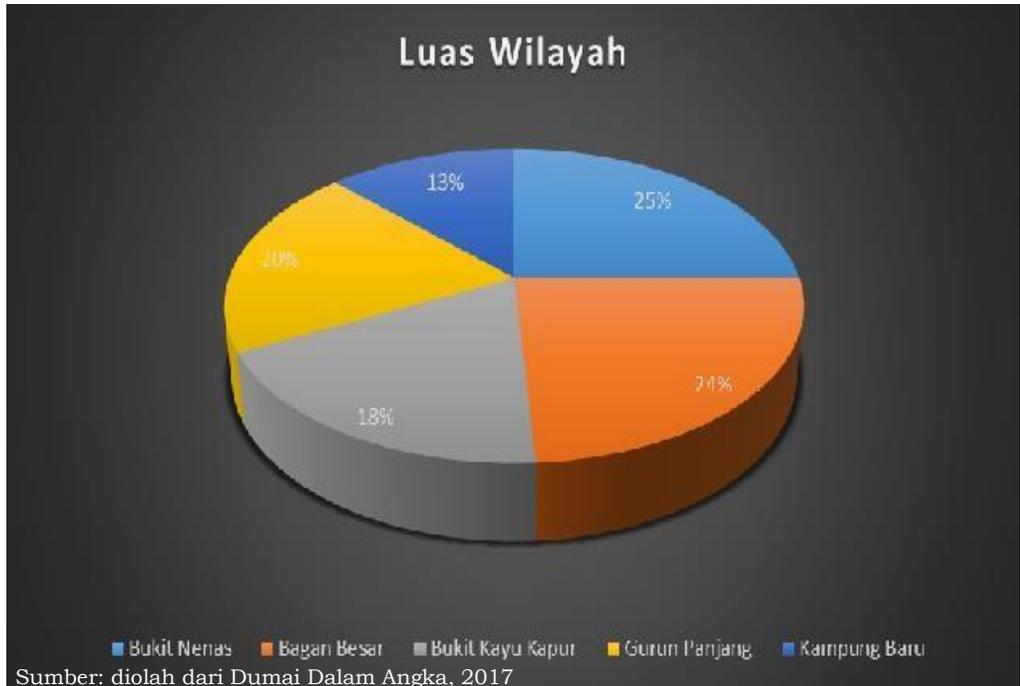
Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Bukit Kapur memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Dumai Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Medang Kampai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir

Setelah pemekaran wilayah maka secara peta sebaran administrasi pemerintahan administrasi pemerintahan, Kecamatan Bukit Kapur terdiri dari 5 kelurahan yang

memanjang dari utara ke selatan, yaitu Bagan Besar, Bukit Nenas, Kampung Baru, Gurun Panjang dan Bukit Kayu Kapur masing-masing dengan luas daratan 73 km², 25 km², 25 km², 40 km², dan 37 km².

Grafik 2.3 Persentase Luas Wilayah Bukit Kapur Menurut Kelurahan



Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Bukit Kapur tahun 2016 terbagi dalam wilayah 5 kelurahan dan 88 rukun tetangga (RT) dengan rincian per kelurahan sebagai berikut:

- Kelurahan Bukit Nenas terdiri dari 13 RT.
- Kelurahan Bagan Besar terdiri dari 26 RT.
- Kelurahan Bukit Kayu Kapur terdiri dari 26 RT.
- Kelurahan Gurun Panjang terdiri dari 10 RT.
- Kelurahan Kampung Baru terdiri dari 13 RT.

4. Kecamatan Sungai Sembilan

Berdasarkan posisi geografisnya, Sungai Sembilan memiliki batas-batas: Utara – Selat Rupat; Selatan – Kecamatan Dumai Barat; Barat – Selat Rupat; Timur – Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Sungai Sembilan terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Bangsal Aceh.
- Kelurahan Lubuk Gaung.
- Kelurahan Basilam Baru.
- Kelurahan Batu Teritip.
- Kelurahan Tanjung Penyembal.

Kecamatan Sungai Sembilan merupakan salah satu kecamatan terluas di Kota Dumai dengan luas daratan 975,38 km². Letak Kecamatan Sungai Sembilan tepat berada di utara Kota Dumai dengan ibukota kecamatan Lubuk Gaung.

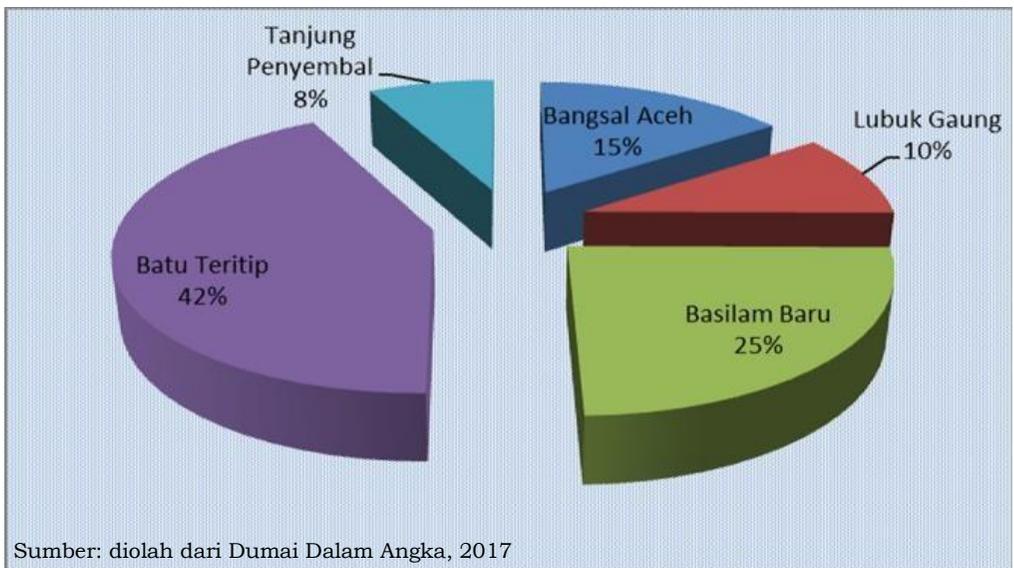
Karakteristik wilayah Kecamatan Sungai Sembilan menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0 – 5 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Semua wilayah yang berbatasan langsung dengan laut atau daerah pesisir pantai.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Sungai Sembilan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Barat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Rupat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir

Setelah pemekaran wilayah maka secara peta sebaran administrasi pemerintahan, Kecamatan Sungai Sembilan terdiri dari 5 (lima) kelurahan yang memanjang dari utara ke selatan, yaitu Bangsal Aceh, Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal, Basilam Baru dan Batu Teritip masing-masing dengan luas daratan 150,0 km²; 95,0 km²; 75,0 km²; 240.0 km² dan 415,38 km².

Grafik 2.4 Persentase Luas Wilayah Sungai Sembilan Menurut Kelurahan



Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Sungai Sembilan tahun 2016 terbagi dalam wilayah 5 kelurahan tidak terdapat rukun warga (RW) dan 84 rukun tetangga (RT) dengan rincian per kelurahan sebagai berikut:

- Kelurahan Bangsal Aceh terdiri dari 10 RT.
- Kelurahan Lubuk Gaung terdiri dari 25 RT.
- Kelurahan Basilam Baru terdiri dari dan 22 RT.
- Kelurahan Batu Teritip terdiri dari 9 RT.
- Kelurahan Tanjung Penyembal terdiri dari 18 RT.

5. Kecamatan Medang Kampai

Berdasarkan posisi geografisnya, Medang Kampai memiliki batas-batas: Utara – Selat Rupat ; Selatan – Kecamatan Bukit Kapur; Barat – Kecamatan Dumai Timur; Timur – Kec. Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Medang Kampai terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Pelintung;
- Kelurahan Guntung;
- Kelurahan Teluk Makmur;
- Kelurahan Mundam.

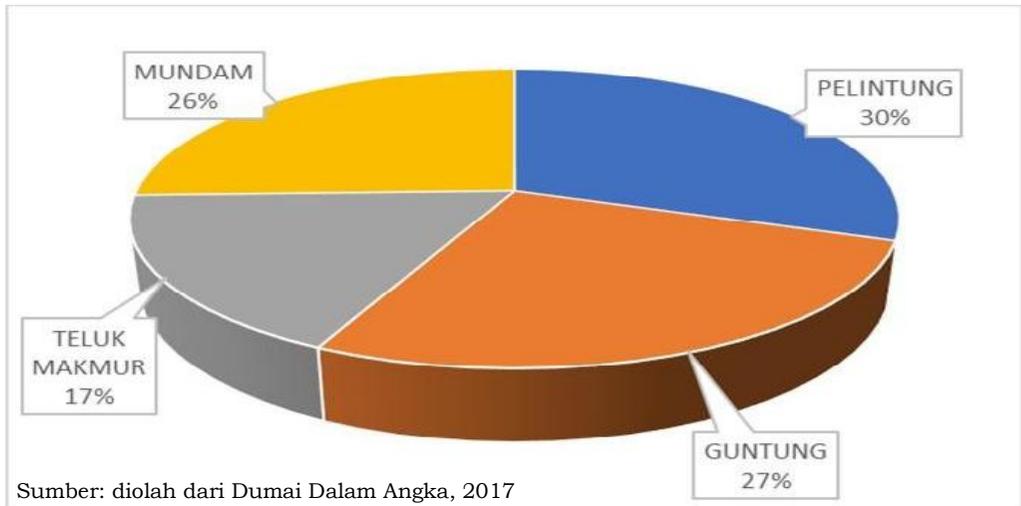
Kecamatan Medang Kampai merupakan salah satu kecamatan pecahan dari Kec. Bukit Kapur di Kota Dumai dengan luas daratan 373 km². Letak Kecamatan Medang Kampai tepat berada di pinggir Kota Dumai dengan ibu kota kecamatan Medang Kampai di Kel. Teluk Makmur.

Karakteristik wilayah Kecamatan Medang Kampai menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0 – 15 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Wilayah yang berbatasan langsung dengan laut atau daerah pesisir pantai yaitu seluruh kelurahan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Medang Kampai memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Bukit Kapur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Dumai Timur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

Setelah pemekaran wilayah maka secara peta sebaran, Kecamatan Medang Kampai terdiri dari 4 kelurahan yang memanjang dari utara ke selatan, yaitu Pelintung, Guntung, Teluk Makmur, dan Mundam masing-masing dengan luas daratan 113 km², 100 km², 65 km² dan 95 km².

Grafik 2.5 Persentase Luas Wilayah Medang Kampai Menurut Kelurahan



Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Medang Kampai tahun 2016 terbagi dalam wilayah 4 kelurahan, 26 rukun tetangga (RT) dengan rincian per kelurahan sebagai berikut:

- Kelurahan Pelintung terdiri dari 11 RT.
- Kelurahan Guntung terdiri dari 4 RT.
- Kelurahan Teluk Makmur terdiri dari 6 RT.
- Kelurahan Mundam terdiri dari 5 RT.

6. Kecamatan Dumai Kota

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumai Kota memiliki batas- batas: Utara – Selat Rupat; Selatan - Dumai Selatan; Barat – Kec. Dumai Barat; Timur – Kec. Dumai Timur. Kecamatan Dumai Kota terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Rimba Sekampung;
- Kelurahan Sukajadi;
- Kelurahan Bintang;
- Kelurahan Dumai Kota;
- Kelurahan Laksamana;

Kecamatan Dumai Kota merupakan kecamatan terkecil di Kota Dumai dengan luas daratan 13 km², dengan Karakteristik wilayah Kecamatan Dumai Kota menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0 – 2 m. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah pesisir pantai yaitu Kelurahan Laksamana dan Kelurahan Dumai Kota, sedangkan kelurahan lainnya bukan daerah pesisir pantai.

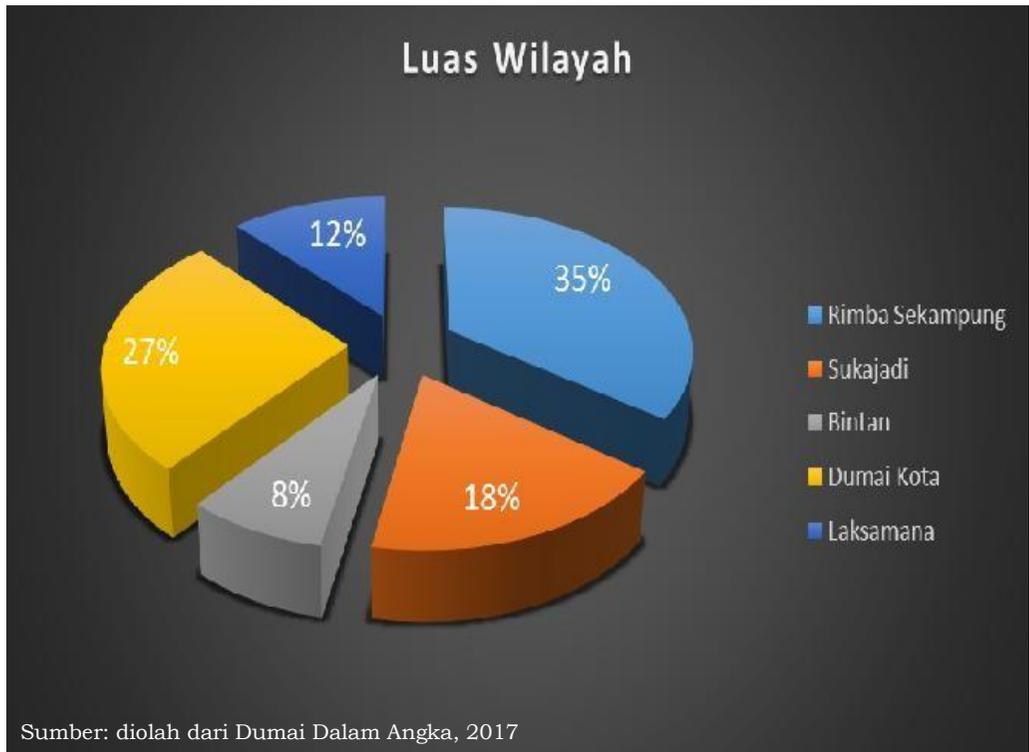
Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumai Kota memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Dumai Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Dumai Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Dumai Barat.

Setelah pemekaran wilayah maka secara peta sebaran, Kecamatan Dumai Kota terdiri dari 5 kelurahan yang memanjang dari utara ke selatan, yaitu Dumai Kota,

Laksamana, Bintang, Sukajadi, dan Rimba Sekampung masing-masing dengan luas daratan 1,5 km², 3,5 km², 1,1 km², 2,4 km², dan 4,5 km².

Grafik 2.6 Persentase Luas Wilayah Dumai Kota Menurut Kelurahan



Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Dumai Kota tahun 2016 terbagi dalam wilayah 5 kelurahan dan 87 rukun tetangga (RT) dengan rincian per kelurahan sebagai berikut:

- Kelurahan Rimba Sekampung terdiri dari 24 RT;
- Kelurahan Sukajadi terdiri dari 23 RT;
- Kelurahan Bintang terdiri dari 18 RT;
- Kelurahan Dumai Kota terdiri dari 15 RT;
- Kelurahan Laksamana terdiri dari 7 RT.

7. Kecamatan Dumai Selatan

Berdasarkan posisi geografisnya, Dumai Selatan memiliki batas-batas: Utara – Kec. Dumai Barat; Selatan – Kec. Bukit Kapur; Barat – Kec. Sungai Sembilan; Timur – Kec. Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Mekar Sari
- Kelurahan Bukit Timah
- Kelurahan Bumi Ayu
- Kelurahan Bukit Datuk
- Kelurahan Ratu Sima

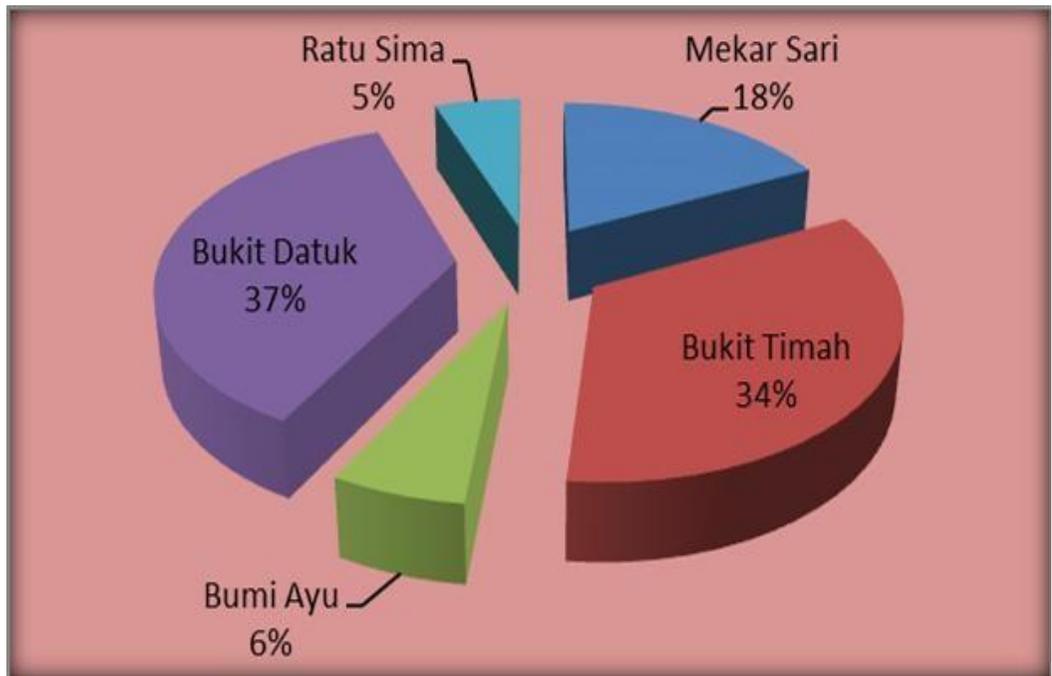
Kecamatan Dumai Selatan merupakan salah satu kecamatan termuda di Kota Dumai dengan luas daratan 73,50 km². Letak Kecamatan Dumai Selatan tepat berada di tengah Kota Dumai dengan ibukota kecamatan Bukit Datuk.

Karakteristik wilayah Kecamatan Dumai Selatan menurut elevasi (ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 2 – 5 dpl. Seluruh wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumai Selatan memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Dumai Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Dumai Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Bukit Kapur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Sungai Sembilan.

Grafik 2.7 Persentase Luas Wilayah Dumai Selatan Menurut Kelurahan



Sumber: diolah dari Dumai Dalam Angka, 2017

Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Dumai Selatan tahun 2016 terbagi dalam wilayah 5 kelurahan dan 91 rukun tetangga (RT) dengan rincian per kelurahan sebagai berikut:

- Kelurahan Mekar Sari terdiri dari 12 RT.
- Kelurahan Bukit Timah terdiri dari 15 RT.
- Kelurahan Bumi Ayu terdiri dari 16 RT.
- Kelurahan Bukit Datuk terdiri dari 29 RT.
- Kelurahan Ratu Sima terdiri dari 19 RT.

II. Kondisi Topografi Kota Dumai

Secara topografi, hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut (mdpl) seperti yang terlihat pada

Tabel 2.2. Memiliki kemiringan antara 0-3 %, hanya sebagian kecil merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng antara 8-15 %.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No.	Kecamatan	Ketinggian (M DPL)
1	Bukit Kapur	3 - 10
2	Medang Kampai	0 - 15
3	Sungai Sembilan	0 - 5
4	Dumai Barat	0 - 3
5	Dumai Selatan	2 - 5
6	Dumai Timur	0 - 3
7	Dumai Kota	0 - 3

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2017

Kota Dumai berada di tepi pantai selatan Selat Rupat dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Barat dan Timur, sedangkan kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang. Jika dilihat dari ketinggiannya, daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2% terdapat sekitar 41.032 Ha (64,90%); daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15% seluas 15.642 Ha (24,71%), daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% seluas 364 Ha (0,58%) dan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40% sekitar 6.200 Ha (9,81%) yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur.

Dari kondisi topografinya, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya

masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian. Hal ini juga didukung oleh kondisi keadaan tanah pada hamparan wilayah Kota Dumai yang memiliki 2 (dua) kelompok atau golongan tanah, yaitu: pertama jenis tanah Typic Trophaquepts atau Fluvisol Gleik dan jenis kedua adalah Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai. Dari beberapa penelitian mengenai karakteristik tanah gambut di wilayah ini menunjukkan bahwa tanah gambut ini memiliki kedalaman hingga 3 m dan rata-rata kedalaman 0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

III. Kondisi Klimatologi Kota Dumai

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2016 berkisar antara 21°C-36,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan terbanyak selama tahun 2016 terjadi pada bulan Mei sedangkan terkecil terjadi pada bulan Februari dengan nilai berturut-turut

sebesar 358,3 mm³ dan 59,3 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 21 hari dan terkecil pada bulan Maret dan Agustus yaitu sebanyak 9 hari. Perkembangan banyaknya hari dan curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2010 sampai 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Tabel 2.3
Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016

Bulan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Januari	15	19	13	13	13	13	16
Februari	12	6	11	11	11	11	11
Maret	12	15	11	11	11	11	9
April	13	16	11	11	11	11	17
Mei	17	5	14	14	14	14	15
Juni	13	9	7	7	7	7	15
Juli	17	9	14	14	14	14	13
Agustus	13	8	18	18	18	18	9
September	tad	15	7	7	7	7	13
Oktober	tad	22	17	17	17	17	15
Nopember	tad	26	21	21	21	21	21
Desember	tad	14	24	24	24	24	20
	112	164	168	168	168	168	174

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

Tabel 2.4
Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2016

Bulan	Curah Hujan (mm ³)						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Januari	144,0	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6
Februari	58,0	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3
Maret	329,0	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0
April	207,0	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2
Mei	330,0	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3
Juni	331,0	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6
Juli	425,0	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4
Agustus	188,0	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7
September	tad	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7
Oktober	tad	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3

Bulan	Curah Hujan (mm ³)						
	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016
Nopember	tad	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0
Desember	tad	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5
	2.012,0	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka

IV. Kondisi Geologi Kota Dumai

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah Podsolik merah kuning dari batuan endapan dan Alluvial serta tanah Organosol dan Gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (Kuartar) berupa alluvium (Qp) dengan bahan penyusun lempung, pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut), dan rawa gambut, sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (Tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan, batu pasir halus, umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu Typic Tropaquepts atau Fluvisol Gleik dan Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota

agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah kota Dumai ini rata-rata memiliki kedalaman 0,5 m yang berarti tidak terlalu dalam, dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan, khususnya di bagian wilayah kota Dumai Lama (Dumai Barat dan Dumai Timur) ini adalah elevasi wilayahnya yang rata-rata hanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut.

Terkait dengan pembangunan sistem drainase kota dan karakteristik pasang surut laut yang sangat berpengaruh terhadap muka air sungai, maka diperlukan berbagai upaya, khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai. Untuk pengembangan kota, karakteristik kondisi lahan yang demikian berkemampuan rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar. Hal ini berarti bahwa untuk membangun infrastruktur dimaksud, akan memerlukan teknologi yang lebih maju dan biaya yang lebih besar, namun dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang telah berkembang pesat saat ini, maka kendala kemampuan lahan tersebut bukan lagi menjadi kendala penting.

V. Kondisi Hidrologi Kota Dumai

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai ini terdapat 60 sungai besar dan kecil dengan total panjang keseluruhannya 221 Km yang semuanya bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Sungai-sungai di daerah Dumai umumnya merupakan sungai abadi (*perennial stream*) yang airnya dapat mengalir sepanjang tahun. Dari 60 sungai tersebut hanya 15 sungai (sepanjang 114 Km) yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai Buluala, Sungai Senepis, Sungai Masjid merupakan tiga sungai yang terpanjang. Berikut ini sungai yang melalui wilayah Kota Dumai.

Tabel 2.5
Sungai yang Terdapat di Kota Dumai

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)
1.	Sungai Pelintung	8,5	5
2.	Sungai Kepala Beruang	5	2
3.	Sungai Selinsing	4	2
4.	Sungai Tanjung Leban	3	1
5.	Sungai Merambung	7	3
6.	Sungai Kemeh	10	4
7.	Sungai Masjid	29	19
8.	Sungai Nerbit	12	5
9.	Sungai Mampu	13	3
10.	Sungai Teras	10	4
11.	Sungai Buluala	40	26
12.	Sungai Geniut	12	7
13.	Sungai Santaulu	22	9
14.	Sungai Senepis	35	20
15.	Sungai Teluk Dalam	10	4

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2015

VI. Kategori Pemanfaatan Lahan di Kota Dumai

Pemanfaatan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi:

- a) Kawasan sempadan pantai yang ditetapkan di sepanjang pantai utara dan selatan Kota Dumai
- b) Kawasan sempadan sungai, merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi

fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Sebaran sungai di Kota Dumai meliputi 58 sungai yang tersebar di Kecamatan Sungai Sembilan, Medang Kampai, Dumai Timur, dan Dumai Barat.

- c) Kawasan pantai berhutan bakau di Kota Dumai terdapat di Tembawan, Kelurahan batu Teritip dengan luas lahan 164 Ha, Hutan bakau yang berada di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dengan luas lahan 39,5 Ha dekat dengan sungai Kembeli Besar dan Alur Sungai Pulau Bungkok Dua. Sedangkan Hutan Bakau yang terdapat di kawasan muara Sungai Masjid, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat dan Kelurahan Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas lahan 227,5 Ha.
- d) Kawasan danau atau waduk, yaitu Danau Putri Tujuh yang merupakan danau alamiah, terletak di kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dengan luas 30,61 Ha dan berada di Kawasan Pengembangan Bandara. Selain danau di Kota Dumai juga terdapat rawa di Kelurahan Bukit Batrem dan Tanjung Palas dengan luas 59,93 Ha. Kawasan sekitar danau khususnya Danau Putri Tujuh di Kota Dumai telah dijadikan tempat wisata.
- e) Kawasan resapan air di Kota Dumai meliputi seluruh sungai yang memiliki sempadan sungai dan saat sekarang Kota Dumai memiliki sempadan sungai seluas 24,3 Km².
- f) Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kota Dumai tidak memiliki mata air secara khusus, namun terdapat pada setiap alur sungai yang kemudian membentuk sungai besar. Mata air di wilayah Kota Dumai berada pada hulu-hulu sungainya yang berjumlah 6 (enam puluh) sungai dengan 9 (sembilan) buah sungai besar.

- g) Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari:
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah, yaitu kawasan suaka margasatwa di kecamatan Sungai Sembilan dan Hutan Wisata di Kecamatan Bukit Kapur. Jika dibandingkan luas ruang terbuka hijau wilayah Kota Dumai dengan luas Kota Dumai, maka ruang terbuka hijau di Kota Dumai telah memenuhi syarat yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan perkotaan yang berupa area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang terdapat di kota Dumai berupa lapangan bola dan lapangan golf.
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan yaitu di setiap lingkungan-lingkungan Perumahan, baik berupa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, dan taman atap bangunan. Ruang terbuka hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3.555,64 Ha, Kecamatan Dumai barat dengan luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai timur dengan luas lahan 27,76 Ha.
- h) Kawasan Hutan Kota, meliputi hutan wisata Kota Dumai ini kawasannya tersebar di Kelurahan Bukit Timah dengan luas 229,1 Ha; Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat dengan luas 290,2 Ha; Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Bukit Kapur 189,8 Ha; Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai dengan luas 743,7 Ha dan Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 1.288 Ha. Sehingga total luas hutan wisata di Kota Dumai mencapai 2.741 Ha.

2. *Kawasan Budidaya*

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Dumai meliputi:

- a) Kawasan Perumahan, terdiri dari Perumahan pertanian dan perkotaan. Kawasan Perumahan di Kota Dumai terdapat di seluruh Kelurahan di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur, sedangkan kawasan Perumahan Pertanian di Kota Dumai terdapat di seluruh Desa selain ibukota Kecamatan.
- b) Kawasan Pusat Pemerintahan, terdiri dari Kawasan Perkantoran Tingkat Kota (Kompleks perkantoran lama dan Kompleks Perkantoran Walikota serta Kompleks Perkantoran DPRD yang berlokasi di Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur dengan luas lahan 100.000 m²) dan Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan (Kecamatan Dumai Kota, Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan)
- c) Kawasan Pariwisata di Kota Dumai meliputi jenis wisata alam, sejarah, agama, olahraga, dan tirta. Daerah wisata yang memanfaatkan naturalnya kondisi alam, diantaranya adalah kawasan konservasi untuk marga satwa (Harimau Sumatera) yang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan. Pariwisata yang telah dikembangkan dan berbasis hutan wisata ada di kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Wisata alam yang dipadukan dengan wisata budaya, dikembangkan di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai yang di sekitarnya terdapat rumah-rumah tradisional/rumah tua berarsitektur Melayu. Pariwisata

alam lainnya yang telah dikembangkan adalah Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur dan wisata budaya yakni yang terkait dengan legenda Makam Puteri Tujuh yang sekarang berada di Kawasan Kilang Operasi Pertamina Unit produksi II di Kota Dumai.

- d) Kawasan Industri yang ada di Kota Dumai adalah industri dasar, aneka industri dan industri kecil dan industri besar/sedang yang tersebar merata di setiap kecamatan. Industri besar berupa pengolahan kelapa sawit, dan pengolahan minyak bumi dan gas (MIGAS). Untuk kegiatan industri besar, Dumai memiliki industri kelapa sawit/CPO (PT. Bukit Kapur Reksa, PT. S.M.A.R.T. Corporation, PT. Sarana Sawitindo Utama, PT. Inti Benua Perkasatama, dan PT. Sarana Tempa Perkasa) yang banyak berdiri di sekitar pelabuhan dan pertambangan minyak bumi.
- e) Kawasan Militer Kota Dumai terletak di antara Kelurahan Bagan Besar dan Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 210,10 Ha. Di dalam konsepsi penataan ruang wilayah kota Dumai, dipahami bahwa Kota Dumai telah memiliki kawasan militer yang telah eksisting, sejalan dengan perkembangan kota Dumai, yakni : TNI - AD, TNI - AL, dan kepolisian. Sedangkan secara khusus TNI - AL memiliki pangkalan TNI - AL yang terletak di kawasan pelabuhan Kota Dumai.
- f) Kawasan Migas dan Non Migas, yaitu: a. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT. Pertamina UP II Dumai dan rencana kawasan Pelabuhan terpadu yang terletak di antara Kelurahan Jayamukti dan Bukit Palas Kecamatan Dumai Timur dengan luas 247,09 Ha. b. Kawasan Migas dan Non Migas yakni kawasan operasional PT. Chevron Pasific Indonesia yang terletak

di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur dengan Luas 459.72 Ha.

- g) Kawasan Pelabuhan di Kota Dumai meliputi pelabuhan laut yang dikelola oleh Pemerintah yaitu oleh PT. Pelabuhan Indonesia Regional I (mengoperasikan kegiatan pelabuhan untuk penumpang, dan juga bongkar muat barang untuk kepentingan Kota Dumai dan juga untuk kepentingan kota-kota di sekitar Kota Dumai); pelabuhan khusus yang dimiliki oleh PT. Pertamina maupun yang dimiliki PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai Pelabuhan khusus bongkar muat bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan ekspor. Selain itu Kota Dumai juga telah memiliki Pelabuhan Khusus untuk bongkar muat *Crude Palm Oil* (CPO) yang dibangun oleh PT. Bukit Kapur Reksa (BKR), terdapat juga Pelabuhan untuk bongkar muat pupuk, khususnya pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, dimana Pelabuhan yang berada di Pelintung tersebut khusus untuk kegiatan bongkar muat dan pemasaran daerah maupun ke luar negeri.

VII. Potensi Pengembangan Wilayah

Untuk kondisi Potensi Pengembangan Wilayah dapat diklasifikasi menjadi 5 (lima) yakni :

- a) Berdasarkan kondisi geografis**, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindungi oleh Pulau Rupa, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan.
- b) Berdasarkan kondisi topografinya yang relative datar**, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi

oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan karena hampir sebagian besar wilayah Kota Dumai merupakan dataran rendah. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian dan perkebunan karena lapisan tanah dominan yang terhampar di wilayah Kota Dumai merupakan lapisan tanah gambut dengan kedalaman 0-0,5 m. Apabila dilakukan pengamatan secara komprehensif dengan didasari karakteristik tanah gambut yang dimiliki dan elevasi wilayah rata-rata yang berkisar 2 meter di atas permukaan laut, maka pada hakekatnya kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang yang masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

- c) **Berdasarkan kondisi klimatologi**, Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut (iklim tropis basah) dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2016 berkisar antara 75-83%. Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.
- d) **Berdasarkan kondisi geologi**, umumnya struktur tanah di Kota Dumai terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kemampuan lahan di wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0-3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah kota Dumai ini memiliki rata-rata

kedalaman 0,5 m dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan adalah elevasi wilayah khususnya di bagian wilayah Dumai Kota, Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya berkisar 0-3 meter di atas permukaan laut, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat dan waktu tertentu sering terjadi banjir terutama pada saat air laut sedang pasang. Terkait hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar.

- e) **Berdasarkan kondisi hidrologi**, wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor) yang pada umumnya dalam kondisi kurang baik, kecuali pada sebagian wilayah yang lebih tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem,

Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai. Di Kota Dumai ini terdapat 60 sungai besar dan kecil dengan total panjang keseluruhannya 221 Km, semuanya bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan.

VIII. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan: "bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan". Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya gempa bumi di wilayah tak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian istilah "alam" juga ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan manusia. Namun demikian pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi serta memiliki kerentanan/kerawanan yang juga tinggi tidak akan memberi dampak yang hebat/luas jika manusia yang berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana (disaster resilience).

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. Selain itu terdapat juga potensi angin puting beliung yang disebabkan tingginya potensi Edi Sirkulasi dimana dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Edi Sirkulasi yang menyebabkan kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jika dilihat dari banyaknya kejadian bencana berupa kabut, maka pada tahun 2002 terdapat 58 kejadian bencana kabut, sedangkan untuk bencana asap paling banyak terjadi pada tahun 2009. Berikut ini banyaknya kejadian kabut dan asap di Kota Dumai yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2.6
Banyaknya Kejadian Asap di Kota Dumai

Bulan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januari				-	-	-
Februari				-	5	-
Maret				-	25	-
April				-	-	-
Mei				-	-	-
Juni				14	28	7
Juli			N/A	17	30	30
Agustus				-	-	30
September				-	-	30
Oktober				-	-	31
November				-	-	-
Desember				-	-	-
Jumlah Kejadian				31	88	128

Sumber : BPBD, 2016



BAB 2

Selain bencana kabut dan asap, masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan terutama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir, maka kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.

BAB III

PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN



PROFIL KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Kependudukan

Data kependudukan mempunyai pengaruh penting dalam perencanaan wilayah. Dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penduduk merupakan subjek dan objek seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah karena setiap hasil pembangunan daerah harus dapat memberikan efek positif kepada penduduk baik langsung maupun tidak langsung (Muta'ali, 2015). Lebih jauh Muta'ali (2015) menjelaskan bahwa antara proses pembangunan dengan penduduk mempunyai hubungan timbal balik yang sangat kuat dalam konteks saling mempengaruhi.

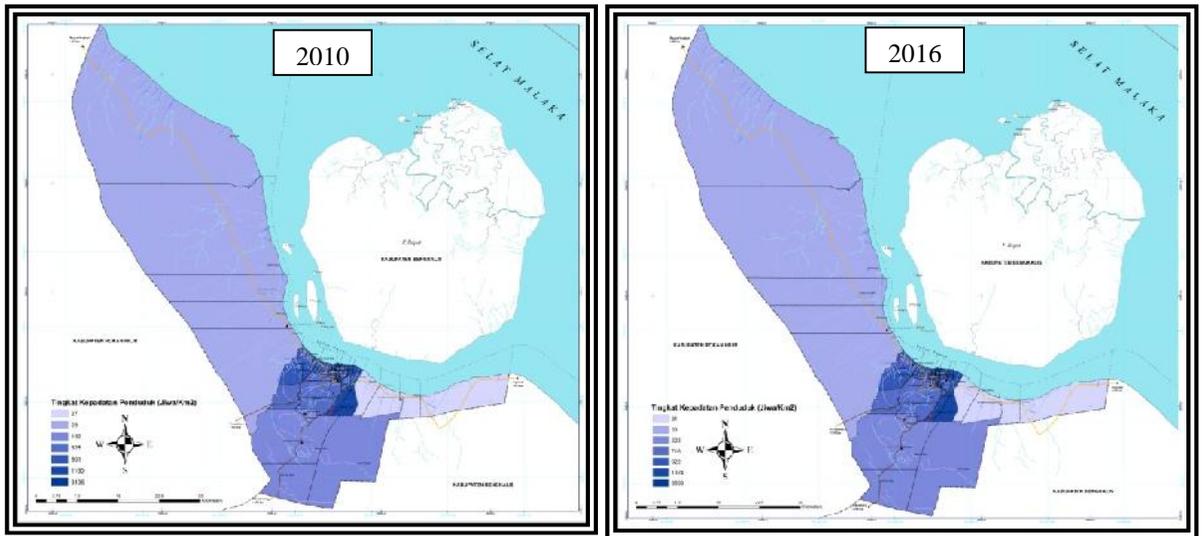
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Dumai

Jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi data oleh BPS Kota Dumai adalah 255.096 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 148 jiwa/km². Sedangkan berdasarkan data yang *publish* BPS tahun 2017, jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2016 mengalami pertumbuhan dari tahun 2010 sebesar 14,43% menjadi 291.908 jiwa (51,31% laki-laki dan 48,69% perempuan) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 169 jiwa/km². Artinya selama periode 2010-2016, penduduk Kota Dumai semakin padat, dengan penambahan tingkat kepadatan penduduk sebesar 21 jiwa/km². Perbandingan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2010 dan 2016 terlihat pada tabel dan Grafik berikut.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Dumai per Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2016

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka, diolah)

No. Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
		2010	2016	2010	2016
1. Bukit Kapur	200,00	38.375	44.447	192	222
2. Medang Kampai	373,00	10.246	11.701	27	31
3. Sungai Sembilan	975,38	27.659	31.860	28	33
4. Dumai Barat	449,80	36.032	41.479	801	922
5. Dumai Timur	735,00	55.106	62.932	1.160	1.324
6. Dumai Kota	475,20	41.535	46.844	3.195	3.603
7. Dumai Selatan	130,00	46.143	52.645	628	716



Grafik 3.1 Perbandingan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2010 dan Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017 (diolah)

Angka pertumbuhan penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan wilayah untuk menentukan rencana pembangunan baik ekonomi, sosial maupun sarana dan prasarana wilayah. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat pelayanan publik di tingkat kota maupun kecamatan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai dari tahun 2010 sampai tahun 2016 adalah sebesar 2,27% per tahun, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Bukit Kapur yaitu sebesar 2,48% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi di Kecamatan Dumai Kota yaitu sebesar 2,03%. Data jumlah penduduk sangat berguna untuk menentukan ambang batas (treshold) penyediaan fasilitas/sarana dan

prasarana pelayanan publik disuatu daerah sesuai dengan standard yang dikeluarkan oleh badan standarisasi nasional.

Meskipun memiliki laju pertumbuhan yang rendah, Kecamatan Dumai Kota merupakan kecamatan terpadat di Kota Dumai selama periode 2010-2016 dengan tingkat pertambahan penduduk sebesar 408 jiwa/km². Adapun tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Dumai Kota tahun 2016 sebesar 3.603 jiwa/km². Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah berdasarkan Rancangan peraturan Daerah (ranperda) Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Kepadatan penduduk tentu akan sangat mempengaruhi penataan ruang khususnya distribusi pemukiman penduduk (muta'ali, 2015). Lebih jauh Muta'ali (2015) menjelaskan bahwa kepadatan penduduk sangat mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah baik secara positif maupun negatif. Kecamatan dengan kepadatan yang tinggi akan menjadi pusat kegiatan sebuah kota baik untuk pemukiman, sosial maupun ekonomi. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}}{\text{Luas wilayah}}$$

Sex Ratio Penduduk Kota Dumai

Komposisi Penduduk suatu kota mengGrafik kan perbandingan-perbandingan penduduk dalam kaitannya dengan gender dan umur. Tabel berikut menyajikan data perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di seluruh kecamatan di kota Dumai Tahun 2016.

Tabel.3.2 Perbandingan antara Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017 (diolah)

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Bukit Kapur	21,345	19,948	44,447
2.	Medang Kampai	6,376	6,004	11,701
3.	Sungai Sembilan	16,881	15,290	31,860
4.	Dumai Barat	19,694	18,890	41,479
5.	Dumai Timur	31,004	29,359	62,932
6.	Dumai Kota	21,704	20,873	46,844
7.	Dumai Selatan	24,370	22,961	52,645
	Kota Dumai	149,791	142,117	291,908

Adapun persamaan untuk menghitung sex ratio adalah sebagai berikut :

$$SR = \frac{L}{P} \times K$$

SR = Sex Ratio

L = jumlah Penduduk

P = Jumlah penduduk perempuan

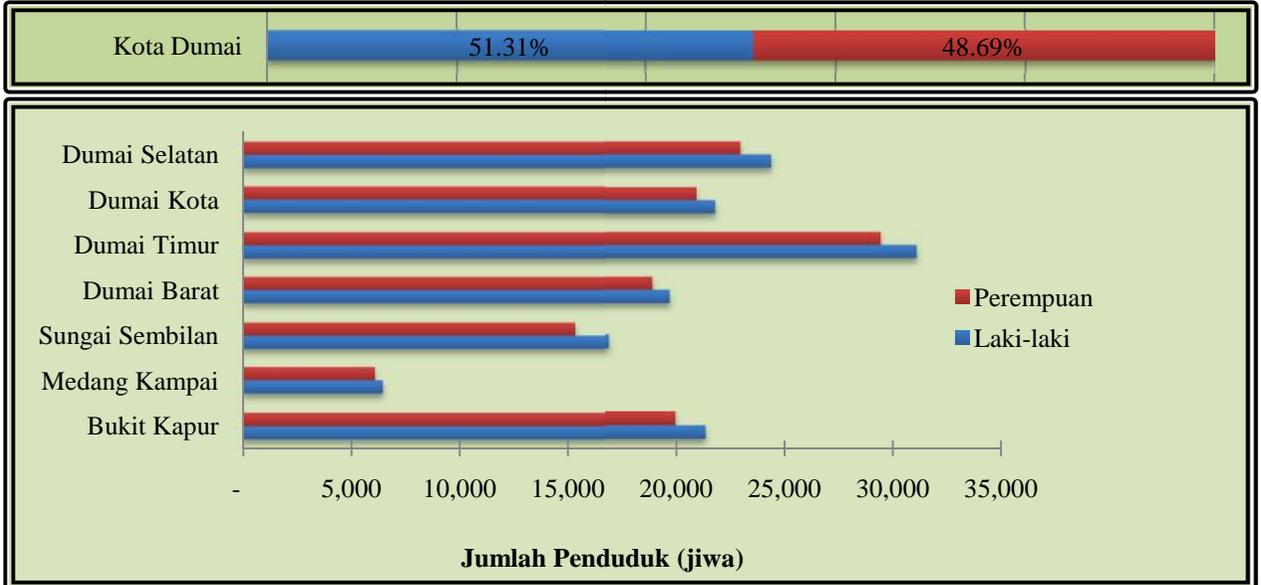
K = Angka Konstanta = 100

Dari persama diatas, maka didapat Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) Kota Dumai tahun

2016 adalah 105, artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas penduduk Kota Dumai masih cukup baik. Jika angka sex ratio ini dibawah 100 maka bisa saja akan menimbulkan berbagai masalah, karena ini mengindikasikan kekurangan penduduk laki-laki untuk melaksanakan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik. Disisi lain hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan ke depan, terutama untuk kebijakan pembangunan yang terkait gender. Data sex ratio sangat berguna untuk pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara proporsional, seperti pendidikan yang berwawasan gender. Informasi terkait sex ratio juga penting diketahui untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan rakyat daerah.

Grafik 3.2 Perbandingan jumlah Penduduk laki-laki dan perempuan Kota Dumai Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017 (diolah)



Dependency Ratio

Komposisi penduduk Kota Dumai dari kelompok usia (umur) akan dapat mengGrafik kan rasio ketergantungan/Rasio beban tanggungan/ Dependency Ratio yaitu suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan penduduk usia produktif (15-64 tahun) atas penduduk usia non produktif (< 15 tahun dan >64 tahun). Didalam bukunya, muta'ali (2015) menjelaskan bahwa Rasio ketergantungan berkaitan erat dengan Bonus Demografi yang diterjemahkan sebagai keuntungan ekonomi yang didapat dari turunya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses perubahan komposisi penduduk dalam kelompok umur. Perubahan komposisi

pendudukan menurut kelompok umur adalah perubahan dari penduduk usia non produktif ke penduduk usia produktif.

Tabel.3.3 Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur per kecamatan tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017 (diolah)

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	17,223	16,670	33,893
5 - 9	15,157	14,376	29,533
10 - 14	13,791	13,141	26,932
15 - 19	13,145	12,076	25,221
20 - 24	12,615	12,279	24,894
25 - 29	13,618	13,028	26,646
30 - 34	12,544	12,592	25,136
35 - 39	11,837	11,391	23,228
40 - 44	10,577	9,838	20,415
45 - 49	9,059	8,462	17,521
50 - 54	7,010	6,652	13,662
55 - 59	5,371	4,928	10,299
60 - 64	3,774	2,913	6,687
65+	4,070	3,771	7,841
Jumlah	149,791	142,117	291,908

Adapun persamaan yang digunakan dalam menghitung Dependency Ratio (DR) adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{\text{Penduduk umur (0-4)} + \text{penduduk umur 65+}}{\text{Penduduk umur (15-64)}} \times K$$

DR = Dependency Ratio

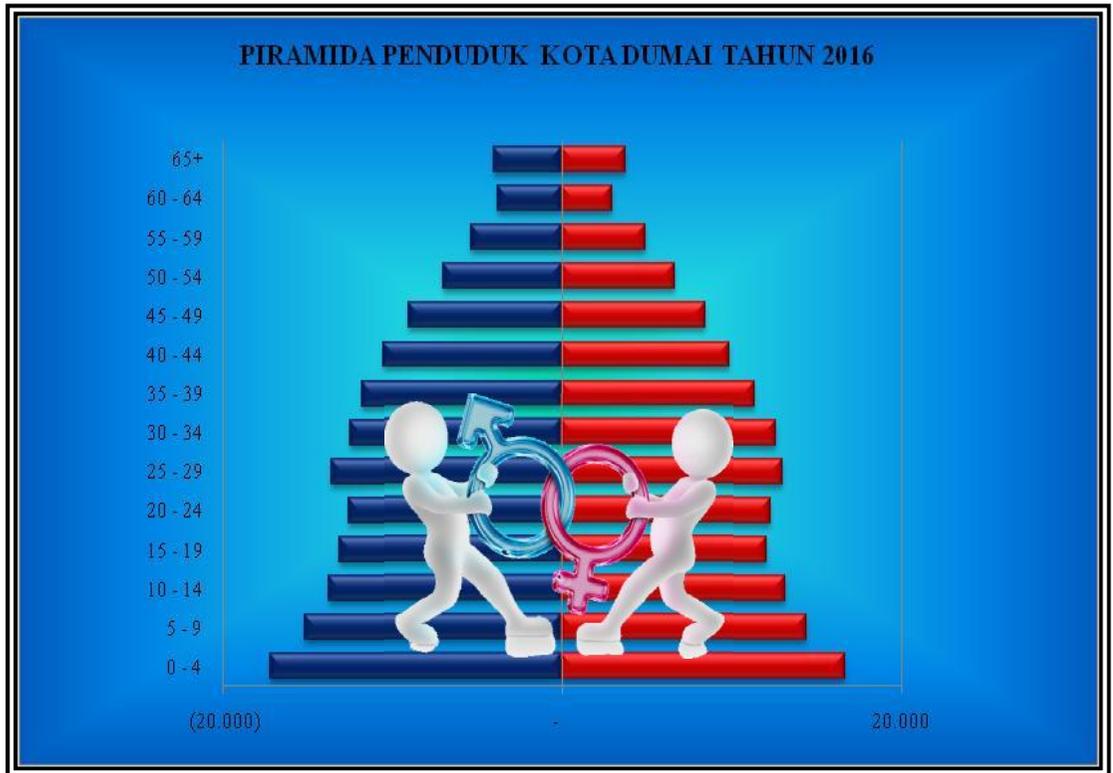
K = Angka Konstanta = 100

Jika dilihat dari komposisi penduduk, struktur penduduk Kota Dumai menurut kelompok umur tahun 2016 terlihat pada Grafik 3.3. Dari Grafik tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi struktur penduduk yaitu sebesar 66,36%, sedangkan 33,64% lagi merupakan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun). Berdasarkan data tersebut, besar rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) di Kota Dumai adalah 51, artinya jumlah penduduk usia kerja di Kota Dumai hampir dua kali lipat penduduk usia non produktif.

Sedangkan perbandingan jumlah penduduk non produktif antara usia anak-anak dengan usia tua (*child to old*) adalah 12, artinya penduduk usia non produktif didominasi oleh penduduk muda yakni 12 kali lipat penduduk tua. Kedua kondisi di atas menunjukkan bahwa Kota Dumai memiliki modal pembangunan (bonus demografi) yang besar berupa penduduk usia produktif yang siap menggerakkan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Disamping itu, angka kelahiran yang tinggi juga harus diantisipasi

dan disikapi secara bijak melalui kebijakan-kebijakan pembangunan karena beberapa tahun ke depan beban pemerintah daerah akan semakin besar terkait penyediaan lapangan pekerjaan maupun penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya lainnya.

Jika melihat nilai rasio ketergantungan kota Dumai maka peluang kota Dumai untuk masuk dalam kondisi Bonus demografi sangat besar. Bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk masuk kedalam priode yang disebut dengan window of opprtunity, yaitu suatu waktu dimana rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasa 50%, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja pada saat periode tersebut lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja (muta'ali, 2015). Grafik dibawah mengGrafik kan piramida penduduk kota Dumai>



Grafik 3.3 Struktur Penduduk Kota Dumai Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017 (diolah)

Indeks Redistribusi dan Konsentrasi Penduduk

Menurut Muta'ali (2015), penduduk sebuah wilayah antara 2 (dua) rentang waktu yang berbeda cenderung untuk terkonsentrasi untuk menyebar (redistribusi). Kecenderungan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk dari rentang waktu yang berbeda, jika dibandingkan dengan luas wilayah maka dapat juga dihitung tingkat konsentrasi keruangannya.

Adapun indeks redistribusi penduduk dapat dihitung dengan menggunakan persamaan

$$\mathbf{IR} = \frac{1}{2} \sum | \mathbf{P}_{t+n} - \mathbf{P}_t |$$

Dimana,

IR = Indeks Redistribusi

P_{t+n} = Persentase penduduk pada tahun $t+n$

P_t = Persentase penduduk pada tahun t

Adapun indeks Konsentrasi penduduk dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan

$$\mathbf{IK} = \frac{1}{2} \sum | \mathbf{P}_t - \mathbf{S}_t |$$

Dimana,

IR = Indeks Konsentrasi

P_t = Persentase penduduk pada tahun t

S_t = Luas Wilayah pada tahun t

Berdasarkan kedua persamaan diatas, maka indeks redistribusi dan indeks konsentrasi penduduk di Kota Dumai pada Tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut :

BAB 3

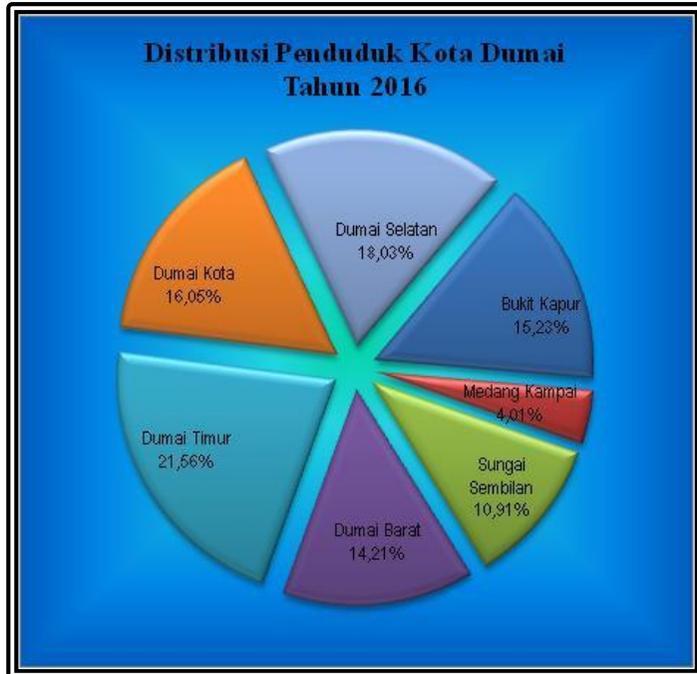
Tabel.3.4 Perhitungan Indeks Redistribusi dan Konsentrasi Penduduk Kota Dumai Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017 (diolah)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Luas Wilayah (km ²)	Distribusi (%)		P ₂₀₁₀ -P ₂₀₁₆ (%)	Luas Wilayah (S _t) (%)	P _t - S _t	
		2010	2016		2016	2010			2016	2010
1.	Bukit Kapur	38,375	44,447	200.00	15.04	15.23	0.18	11.58	3.47	3.65
2.	Medang Kampai	10,246	11,701	373.00	4.02	4.01	0.01	21.59	17.58	17.58
3.	Sungai Sembilan	27,659	31,860	975.38	10.84	10.91	0.07	56.47	45.62	45.55
4.	Dumai Barat	36,032	41,479	44.98	14.12	14.21	0.08	2.60	11.52	11.61
5.	Dumai Timur	55,106	62,932	47.52	21.60	21.56	0.04	2.75	18.85	18.81
6.	Dumai Kota	41,535	46,844	13.00	16.28	16.05	0.23	0.75	15.53	15.29
7.	Dumai Selatan	46,143	52,645	73.50	18.09	18.03	0.05	4.25	13.83	13.78
	Kota Dumai	255,096	291,908	1,727.38	100.00	100.00	0.68	100.00	126.40	126.27
					IR		0.34	IK	63.20	63.14

Selama periode 2010-2016, angka Indeks Redistribusi (IR) penduduk Kota Dumai sebesar 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat redistribusi penduduk Kota Dumai selama tahun 2010-2016 sangat rendah, atau dapat dikatakan bahwa penduduk Kota Dumai masih tersebar di wilayah yang sama selama kurun waktu tersebut. Jika dilihat dari tingkat konsentrasi keruangannya, nilai Indeks Konsentrasi (IK) penduduk Kota Dumai tahun 2010 adalah 63,20 dan turun menjadi 63,14 pada tahun 2016. Penurunan nilai IK ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2010-2016 distribusi penduduk di Kota Dumai menuju distribusi yang lebih merata berdasarkan distribusi luas wilayahnya, meskipun distribusi penduduk masih terkonsentrasi di wilayah yang sama selama kurun waktu tersebut. Kedua hal ini juga terlihat dari Grafik 3.1 di atas.

Distribusi penduduk di Kota Dumai pada tahun 2016 menurut kecamatan seperti yang terlihat pada Grafik 3.4 menunjukkan bahwa penduduk Kota Dumai saat ini masih terkonsentrasi di Kecamatan Dumai Timur, yaitu sebanyak 21,56% penduduk. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Medang Kampai yaitu sebesar 4,01%.



Grafik 3.4 Distribusi Penduduk Kota Dumai Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017 (diolah)

Ketenagakerjaan

Berbicara penduduk tentunya tidak dapat dipisahkan dari permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tentunya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Tingginya jumlah angkatan kerja seyogyanya juga harus disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menghindari bertambah tingginya angka pengangguran. Jika angka pengangguran semakin tinggi maka angka kemiskinan juga akan meningkat. Rentetan panjang dari permasalahan sosial ini bukan hanya akan dirasakan oleh penduduk pada usia kerja, tetapi juga pada semua golongan usia. Pada akhirnya sulitnya mendapatkan

penghasilan akan berdampak pada penurunan kualitas kesehatan dan pendidikan, juga akan berdampak pada perekonomian daerah. Artinya, cita-cita luhur bangsa dalam mensejahterakan masyarakat juga akan semakin sulit untuk dicapai. Dengan kata lain, masalah kependudukan juga menjadi momentum penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Adapun beberapa data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan elastisitas kesempatan kerja (EKK).

Tabel.3.5 Kondisi Ketenaga Kerjaan Kota Dumai Tahun 2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Dumai, 2017

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, 2017

Uraian	2016	
	Nilai	Satuan
Penduduk 15 Tahun Ke atas **	213.326	Orang
1). Menurut Jenis Kegiatan	117.709	Orang
2). Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	33.721	Orang
3). Menurut Status Pekerjaan Utama	61.896	Orang
Angkatan Kerja **	142.099	Orang
1). Bekerja **		
1. Perempuan Bekerja	46.318	Orang

Uraian	2016	
	Nilai	Satuan
2. Laki – Laki Bekerja	95.781	Orang
2). Mencari Pekerjaan	5.925	Orang
1. Perempuan Bekerja	884	Orang
2. Laki – Laki Bekerja	1.422	Orang
Kesempatan Kerja	55,18	%
Jumlah Pencari Kerja Yang Mendaftarkan	5.925	Orang
Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	2.019	Orang
Jumlah Pengangguran : **	24.390	Orang
1). Pengangguran terselubung	6.713	Orang
2). Setengah Menganggur	11.752	Orang
3). Pengangguran Terbuka	5.925	Orang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi tentang penduduk yang aktif bekerja setiap hari pada suatu waktu. TPAK juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif berkerja atau mencari pekerjaan. Jika angka TPAK kecil maka kemungkinan jumlah penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun yang mengurus rumah tangga. TPAK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan diatas didapat bahwa TPAK kota Dumai Tahun 2016 adalah

$$TPAK = \frac{142.099}{213.326} \times 100\%$$

$$TPAK = 66,61\%$$

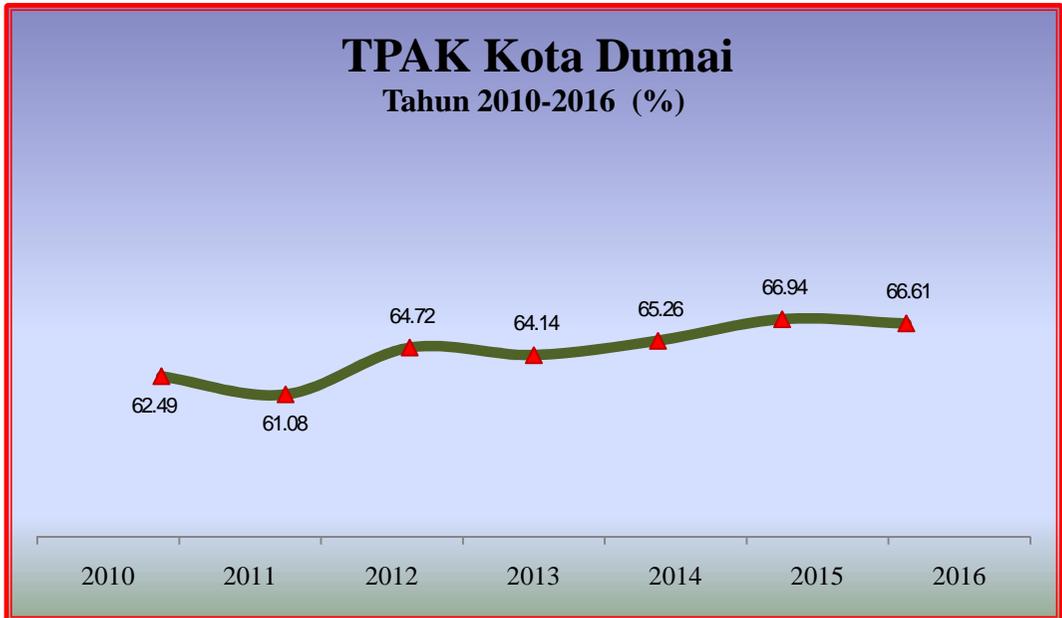
Dari perhitungan tersebut TPAK kota Dumai Tahun 2016 adalah 66,61%, artinya dari 100 penduduk kota Dumai usia 15 tahun keatas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa pada tahun 2016. Semakin Tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat dalam memproduksi barang/jasa di suatu wilayah (muta'ali, 2015). Adapun kriteria TPAK adalah sebagai berikut:

< 50 : TPAK rendah

51-70 : TPAK sedang

>70 : TPAK tinggi

Dari kriteria TPAK diatas, maka dapat disimpulkan bahwa TPAK kota Dumai termasuk sedang. Semakin tinggi angka TPAK mengindikasikan semakin tinggi pula ketersediaan tenaga kerja (labour supply) di Kota Dumai untuk memproduksi barang/jasa dalam konteks perekonomian wilayah.



Grafik 3.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Dumai
Tahun 2010- 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017 (diolah), Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Dumai, 2017, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai, 2017

Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Muta'ali (2015), pengangguran adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (jobless). Pengangguran dengan kategori seperti tersebut adalah pengangguran terbuka (open unemployment). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan tentang peluang pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat

menunjukkan tingkat keberhasilan program pemerintah dibidang ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian selain tingkat kemiskinan.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan diatas didapat bahwa TPT kota Dumai Tahun 2016 adalah

$$TPT = \frac{5.925}{142.099} \times 100\%$$

$$TPT = 4,00\%$$

Jika dilihat data tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, maka terjadi penurunan TPT dari 11,23% menjadi 4,00%. Penurunan TPT ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga potensi kerawanan sosial didalam kehidupan masyarakat kota Dumai seperti naiknya tingkat kriminalitas bisa diperkirakan menurun. Berdasarkan klasifikasi tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka kota Dumai masih masuk kategori rendah.

Adapun kriteria TPT adalah sebagai berikut (muta'ali, 2015) :

>70 : tinggi

51-69 : sedang

<50 : rendah

Tingkat Pengangguran terbuka dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Dari sisi ketenagakerjaan, terdapat suatu informasi penting yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, yaitu tingginya angka partisipasi angkatan kerja di Kota Dumai yang harus disertai dengan penurunan angka pengangguran di Kota Dumai. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan penduduk usia produktif (khususnya pencari kerja) di Kota Dumai, tetapi faktor ini perlu dikaji lebih lanjut.

Kemiskinan

Proses pencapaian cita-cita pembangunan daerah selalu tidak pernah lepas dari kondisi kemiskinan. Dalam konteks pembangunan wilayah, kemiskinan menjadi salah satu indikator utama kinerja pembangunan. Evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah tingkat provinsi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengurangi tingkat kemiskinan daerah, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat dan ketimpangan wilayah.

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh setiap tingkatan pemerintahan. Menurut Munir (2002), kemiskinan sangat dipengaruhi oleh multi aspek dan dimensi, sehingga pandangan terhadap kemiskinan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang yang dicermati. Lebih jauh munir (2002) menjelaskan bahwa kemiskinan dan kesenjangan memunculkan kesenjangan sosial didalam masyarakat.

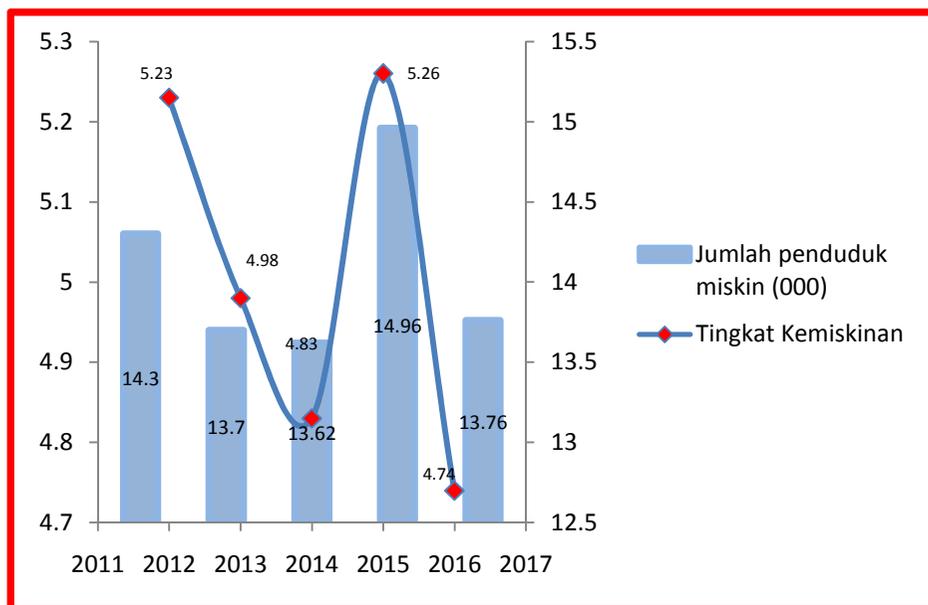
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (headcount) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif, hal ini dapat kita lihat pada tabel kemiskinan dikota Dumai sebagai berikut:

Tabel.3.6 Tingkat Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2016

(Sumber: TNP2K, BPS, 2017)

Uraian	2012*	2013*	2014*	2015**	2016**
Jumlah penduduk miskin (000)	14.30	13.70	13.62	14.96	13.76
Persentase penduduk miskin	5.23	4.98	4.83	5.26	4.74
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	311.891	328.158	341.525	353.079	369.624

Jika kita perhatikan tabel diatas, tingkat kemiskinan kota Dumai selama kurun waktu 2012-2016 cenderung berfluktuatif dengan kecenderungan selama 2012-2014 cenderung turun namun pada tahun 2015 tingkat dan jumlah kemiskinan kota Dumai naik 0,43 persen menjadi 5,26% atau menjadi 14.960 jiwa penduduk miskin dan pada tahun 2016 kembali turun menjadi 4,74% atau menjadi 13.760 jiwa penduduk miskin.



Grafik 3.5 Grafik Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012- 2016

(Sumber: TNP2K, BPS, 2017)

Sedangkan garis kemiskinan kota Dumai pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.369.624/kapita/bulan. Dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis

kemiskinan non makanan (GKNM). Adapun persamaan garis kemiskinan adalah sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

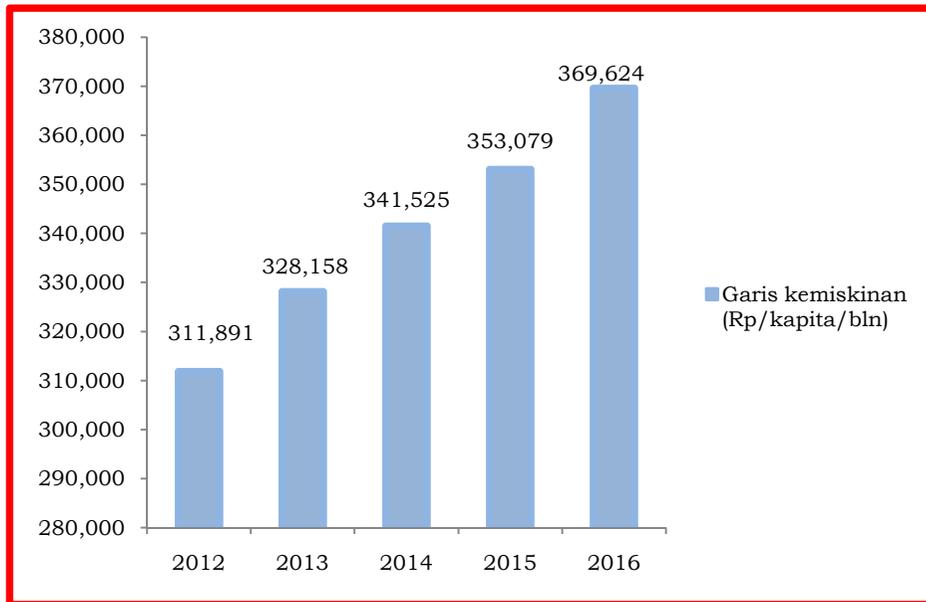
dimana,

GK = Garis kemiskinan

GKM= garis kemiskinan makanan

GKNM = garis kemiskinan non-makanan

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan dibawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh worldbank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk developing countries. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indek kedalam kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Grafik berikut mengGrafik kan gariskemiskinan kota Dumai tahun 2012-2016 :



Grafik 3.6 Grafik Garis Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012- 2016
(Sumber: TNP2K, BPS, 2017)

Seperti yang telah disampaikan di atas, permasalahan Kependudukan dan ketenagakerjaan juga erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Selama kurun waktu 2011-2016 persentase penduduk miskin Kota Dumai berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Riau seperti yang terlihat pada Grafik 3.7. Dari Grafik 3.7 jika dilihat pada tahun 2012-2016 tersirat suatu kenyataan bahwa penurunan angka pengangguran juga disertai dengan penurunan persentase masyarakat miskin, begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya angka pengangguran terbuka ternyata telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini tentunya menjadi suatu catatan penting bagi pemerintah daerah dan harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah antara lain melalui peningkatan kualitas SDM serta optimalisasi sektor-sektor basis yang mampu menyerap banyak

angkatan kerja dan meningkatkan kerjasama antar wilayah dengan mengedepankan kerjasama berbasis potensi wilayah.



Grafik 3.7 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2011-2016 (%)
Kota Dumai vs Provinsi Riau

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Daya Dukung Demografis

Salah satu analisa yang juga penting dalam perencanaan pembangunan wilayah terkait kependudukan adalah daya dukung demografis atau yang disebut juga dengan daya tampung wilayah. Menurut Muta'ali (2015), apabila daya dukung lahan lebih besar daripada kebutuhan ruang (normatif), maka daya dukung demografis baik, begitu juga sebaliknya apabila daya dukung lahan lebih kecil daripada kebutuhan ruang (normatif), maka daya dukung demografis rendah. Pada Tabel 3.2 terlihat bahwa dengan menggunakan standar normatif kebutuhan ruang Yeates, seluruh kecamatan di Kota Dumai masih memiliki daya tampung wilayah yang baik kecuali Kecamatan

Dumai Kota. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Dumai Kota ternyata telah sampai kepada kondisi tidak terpenuhinya standar kebutuhan ruang minimal penduduk. Kondisi ini harus segera menjadi perhatian untuk segera disikapi oleh pemerintah daerah.

Tabel 3.7 Analisa Daya Dukung Demografis Kecamatan se-Kota
Dumai Tahun 2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Ruang Minimal (Ha/jiwa)	Daya Dukung Lahan (Ha/jiwa)	Daya Dukung Demografis
1.	Bukit Kapur	20.000	44.447	0,080	0,450	Baik
2.	Medang Kampai	37.300	11.701	0,082	3,188	Baik
3.	Sungai Sembilan	97.538	31.860	0,079	3,061	Baik
4.	Dumai Barat	4.498	41.479	0,080	0,108	Baik
5.	Dumai Timur	7.350	62.932	0,069	0,076	Baik
6.	Dumai Kota	4.752	46.844	0,080	0,028	Rendah
7.	Dumai Selatan	1.300	52.645	0,068	0,140	Baik

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa berdasarkan data daya tampung demografis, maka daya tampung lahan kecamatan Dumai Timur dan Dumai Kota masuk kategori rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan ruang/lahan di kedua kecamatan tersebut sudah tidak mampu mendukung kebutuhan jumlah penduduk yang ada pada tahun 2015. Sedangkan untuk kecamatan Medang Kampai, Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Dumai Barat dan Dumai Selatan masih masuk kategori berdaya tampung baik.

Semakin besar nilai daya tampung demografis maka mengindikasikan wilayah tersebut memiliki daya tampung yang lebih besar dan jika nilai tersebut dibandingkan dengan kebutuhan ruang (normatif) lebih besar, maka daya tampung wilayah masih baik dan sebaliknya jika nilai daya tampung demografis lebih rendah dari kebutuhan maka daya tampung wilayah masuk kategori rendah.

BAB IV

PROFIL EKONOMI



PROFIL EKONOMI

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Muta'ali, 2015). Lebih lanjut Muta'ali mengatakan bahwa terdapat dua tipe perhitungan PDRB yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Sedangkan untuk menghitung PDRB terdapat tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan produksi; (2) pendekatan pendapatan; dan (3) pendekatan pengeluaran.

PDRB merupakan data dasar yang digunakan dalam melakukan analisis perekonomian wilayah sehingga memiliki manfaat yang sangat banyak dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Beberapa manfaat PDRB antara lain adalah sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan perkapita, kemakmuran, kenaikan dan penurunan daya beli masyarakat, tingkat inflasi dan deflasi, mengGrafik kan struktur perekonomian dan potensi ekonomi daerah serta hubungan antar sektor.

Data PDRB yang disajikan pada buku ini mengGrafik kan perekonomian di masa lalu, yang sedang terjadi, dan prediksi di masa yang akan datang, dimana data-data yang digunakan adalah data-data yang *dipublish* oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 sampai tahun 2017 yang disajikan dalam 17 sektor perekonomian. Pada buku ini, data PDRB digunakan untuk menghitung tren pertumbuhan wilayah, struktur dan transformasi perekonomian wilayah, struktur perekonomian regional (*share*

regional), *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), investasi yang dibutuhkan

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mengGrafikkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB ADHB Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 PDRB ADHB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Dumai)

NO.	SEKTOR/SUB SEKTOR	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.247.513,76	1.290.663,15	1.437.574,71	1.551.170,34	1.687.641,38
2.	Pertambangan dan Penggalian	90.719,37	93.218,95	108.904,95	120.471,72	121.859,63
3.	Industri Pengolahan	9.345.365,12	10.909.915,76	12.499.495,37	13.521.271,09	15.058.108,05
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7.674,18	7.555,57	11.694,09	18.026,24	24.522,43
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.520,36	3.454,51	3.653,86	4.044,55	4.293,05
6.	Konstruksi	2.337.085,15	2.556.624,71	2.562.176,39	2.869.884,03	3.214.657,79
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.861.649,38	4.014.813,24	4.589.145,67	4.691.523,15	5.000.294,68
8.	Transportasi dan Pergudangan	551.241,25	615.012,00	727.106,64	807.763,79	877.796,94
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126.321,93	162.081,92	200.381,58	235.071,24	260.520,57
10.	Informasi dan Komunikasi	173.009,54	198.535,24	234.989,02	270.710,40	294.246,73
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	462.454,81	578.397,53	366.129,13	355.025,11	365.887,32
12.	Real Estate	92.715,08	100.011,55	113.119,61	127.215,13	134.709,46
13.	Jasa Perusahaan	965,13	1.070,51	1.223,74	1.419,08	1.554,95
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	453.573,61	474.552,02	494.473,40	524.615,72	541.616,22
15.	Jasa Pendidikan	89.696,05	96.837,53	122.921,41	142.978,73	149.543,32
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29.852,50	33.349,65	37.775,23	46.880,43	49.787,22
17.	Jasa lainnya	83.006,22	95.672,32	117.702,05	142.498,86	158.356,28
PDRB ADHB		18.956.363,44	21.231.766,16	23.628.466,85	25.430.569,61	27.945.396,02

PDRB ADHB digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi wilayah, struktur dan transformasi ekonomi wilayah.

Analisis Struktur dan Transformasi (Pergeseran) Ekonomi Wilayah

Struktur ekonomi wilayah dapat digambarkan dari data distribusi persentase PDRB. Struktur perekonomian wilayah, khususnya menurut lapangan usaha memiliki dasar teoritis tentang transformasi ekonomi wilayah, dimana perkembangan wilayah umumnya diikuti dengan perubahan peran sektor dalam perekonomian regional. Transformasi struktur ekonomi merupakan proses pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Transformasi ekonomi dapat terjadi disebabkan oleh sifat manusia dalam kegiatan ekonominya. Analisis struktur dan transformasi ekonomi wilayah bermanfaat untuk: (1) mengetahui peran perekonomian sub wilayah terhadap wilayah yang lebih besar; (2) peran suatu sektor dalam perekonomian wilayah; (3) identifikasi awal sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi; (4) analisis proses dan tahap transformasi struktural; dan (5) mampu menunjukkan level atau tingkat industrialisasi suatu wilayah. Analisis struktur ekonomi menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

Struktur Perekonomian Regional (*Share Regional*)

Struktur perekonomian regional digunakan untuk menganalisis peran masing-masing kabupaten/kota baik secara

keseluruhan maupun sektoral dalam wilayah provinsinya. Distribusi peran ekonomi sub wilayah kabupaten/kota juga menunjukkan tingkat konsentrasi dan pemerataan perekonomian wilayah. Perkembangan peran PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun 2012-2016 terlihat pada Tabel 4.2 dan Grafik 4.1.

Tabel 4.2 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016

(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

Tahun	PDRB Kota Dumai (Juta Rupiah)	PDRB Provinsi Riau (Juta Rupiah)	Share Regional (%)
2012	18.956.363,45	558.492.724,75	3,39
2013	21.231.766,16	607.498.449,77	3,49
2014	23.628.466,85	679.387.741,74	3,48
2015	25.430.569,61	652.386.422,51	3,90
2016	27.945.396,02	682.351.091,85	4,10

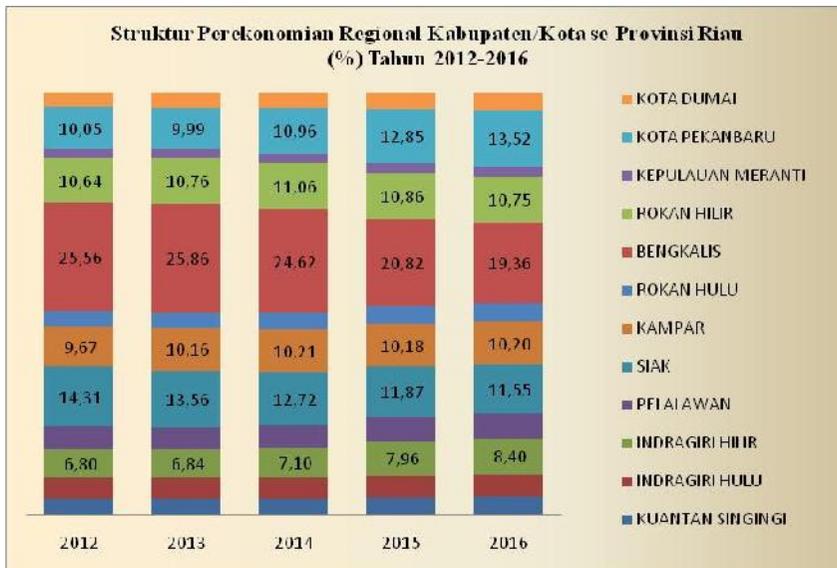


Grafik 4.1 Struktur Perekonomian Regional Kota Dumai Tahun 2012-2016

(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

BAB 4

Dari tabel dan Grafik di atas terlihat bahwa peran PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dari tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan dengan besar kontribusi rata-rata 3-4%, namun besarnya kontribusi tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Tiga kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Riau tahun 2012-2016 berturut-turut adalah Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, seperti yang terlihat pada Grafik 4.2.



Grafik 4.2 Struktur Perekonomian Regional (*Share Regional*) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2012-2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

Struktur Perekonomian Sektoral (*Share Sektoral*)

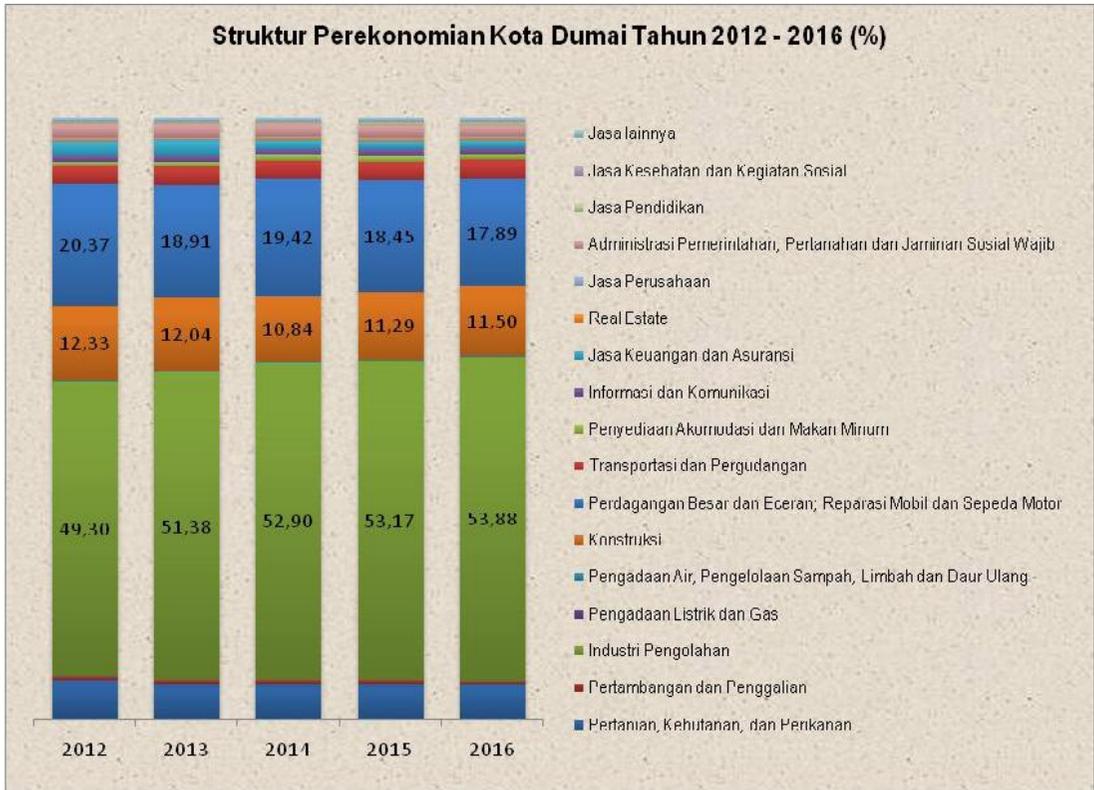
Struktur perekonomian sektoral digunakan untuk menganalisis peran sektor dalam pembangunan wilayah. Analisis dominasi peran suatu sektor dalam perekonomian dapat menunjukkan basis perekonomian wilayah. Struktur perekonomian

sektoral Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Grafik 4.3.

Tabel 4.3 Struktur Perekonomian Sektoral (*Share Sektoral*) Kota Dumai Tahun 2012-2016

(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

No	Sektor	Kontribusi Sektoral (%)					Pergeseran (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	-0,54
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,44	0,46	0,47	0,44	-0,04
3.	Industri Pengolahan	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	4,58
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09	0,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
6.	Konstruksi	12,33	12,04	10,84	11,29	11,50	-0,83
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	-2,48
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,91	2,90	3,08	3,18	3,14	0,23
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,67	0,76	0,85	0,92	0,93	0,27
10.	Informasi dan Komunikasi	0,91	0,94	0,99	1,06	1,05	0,14
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,44	2,72	1,55	1,40	1,31	-1,13
12.	Real Estate	0,49	0,47	0,48	0,50	0,48	-0,01
13.	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	2,24	2,09	2,06	1,94	-0,45
15.	Jasa Pendidikan	0,47	0,46	0,52	0,56	0,54	0,06
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,02
17.	Jasa lainnya	0,43	0,45	0,50	0,56	0,57	0,13



Grafik 4.3 Struktur Perekonomian Sektorial Kota Dumai Tahun 2012-2016 (%)
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

Dari tabel dan Grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2016 struktur perekonomian Kota Dumai didominasi oleh peran sektor industri pengolahan. Artinya, identifikasi awal sektor utama di Kota Dumai sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah **sektor industri pengolahan**.

Peran sektor industri dapat digunakan untuk menilai level industrialisasi suatu wilayah, misalnya dengan menggunakan criteria dari UNIDO (*United Nations for Industrial Development Organization*), yaitu :

1. PDB atau PDRB sektor industri < 10%, dikelompokkan sebagai negara atau wilayah non industri;
2. PDB atau PDRB sektor industri 10-20%, menunjukkan negara atau wilayah memasuki proses industrialisasi;
3. PDB atau PDRB sektor industri 20-30%, berarti negara atau wilayah tergolong semi industri;
4. PDB atau PDRB sektor industri > 30%, masuk dalam kategori negara atau wilayah industri.

Dari Tabel 4.3 dan Grafik 4.3 dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dari tahun 2012 sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan dengan besar kontribusi rata-rata >50%, berdasarkan kriteria dari UNIDO Kota Dumai masuk dalam kategori **wilayah industri**.

Transformasi Ekonomi Wilayah

Struktur perekonomian wilayah memiliki dasar teoritis tentang transformasi ekonomi wilayah, dimana perkembangan wilayah umumnya diikuti dengan perubahan peran sektor dalam perekonomian regional (Muta'ali, 2015). Transformasi struktur ekonomi merupakan proses pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan lapangan usaha, maka sektor-sektor ekonomi dibedakan ke dalam 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:

1. Sektor Primer, terdiri dari: (1) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan (2) sektor pertambangan dan penggalan.
2. Sektor Sekunder, terdiri dari: (1) sektor industri pengolahan; (2) sektor pengadaan listrik dan gas; (3) sektor pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dan (4) sektor konstruksi.

3. Sektor Tersier, terdiri dari: (1) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (2) sektor transportasi dan pergudangan; (3) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) sektor informasi dan komunikasi; (5) sektor jasa keuangan dan asuransi; (6) sektor real estate; (7) sektor jasa perusahaan; (8) sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib; (9) sektor jasa pendidikan; (10) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (11) sektor jasa lainnya.

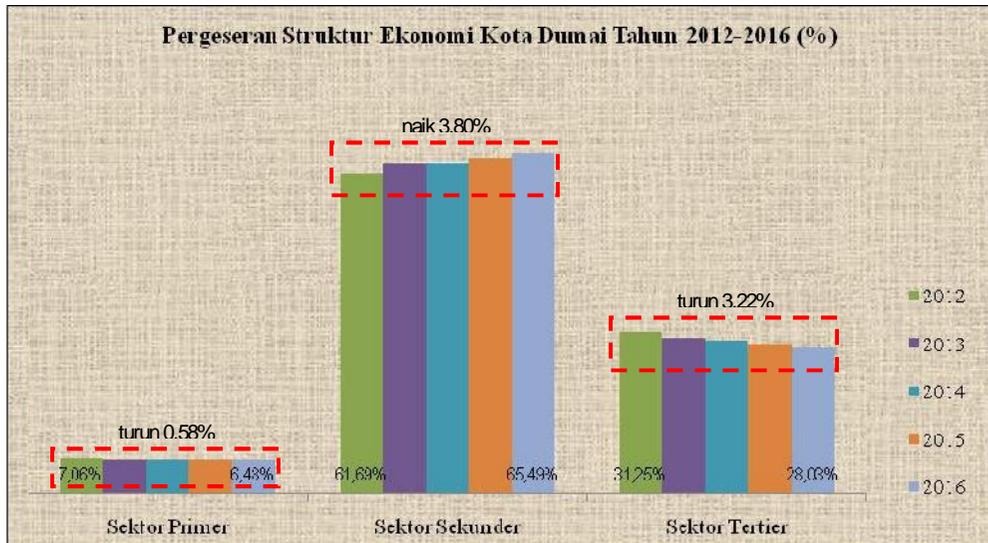
Dari Tabel 4.3 di atas terlihat bahwa telah terjadi perubahan besarnya peran sektor-sektor dalam perekonomian wilayah pada PDRB Kota Dumai dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dengan total pergeseran selama periode tersebut terlihat jelas pada tabel yang dimaksud. Jika dikelompokkan ke dalam 3 kelompok utama, maka besarnya pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Struktur Perekonomian Sektoral Kota Dumai Tahun 2012-2016 Berdasarkan 3 (Tiga) Kelompok Sektor Utama
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

No	Sektor	Kontribusi Sektoral (%)					Pergeseran (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Sektor Primer	7,06	6,52	6,54	6,57	6,48	-0,58
2.	Sektor Sekunder	61,69	63,48	63,81	64,54	65,49	3,80
3.	Sektor Tersier	31,25	30,00	29,65	28,89	28,03	-3,22

Dari tabel di atas terlihat bahwa peran sektor sekunder mendominasi peran sektoral pada PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor sekunder ini terus meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2016 dengan total pergeseran selama kurun waktu 2012-2016

sebesar 3,80%. Disisi lain, terlihat bahwa peran sektor primer dan tersier terus mengalami penurunan dengan total pergeseran masing-masing selama kurun waktu 2012-2016 berturut-turut adalah sebesar -0,58% dan -3,22%. Dari kondisi ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sektor sekunder merupakan sektor utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Kota Dumai dengan kontribusi di atas 61% setiap tahunnya, namun peran sektor primer dan tersier tetap harus dikembangkan karena sektor primer berperan sebagai sumber input pada sektor sekunder, dan sektor tersier berperan dalam peningkatan output sektor sekunder. Besarnya pergeseran struktur ekonomi Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 4.4.



Grafik 4.4 Pergeseran Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016 (%)
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana tahun dasar yang digunakan pada buku ini adalah tahun dasar 2010. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) serta investasi yang dibutuhkan. PDRB ADHK Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 PDRB ADHK 2010 Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

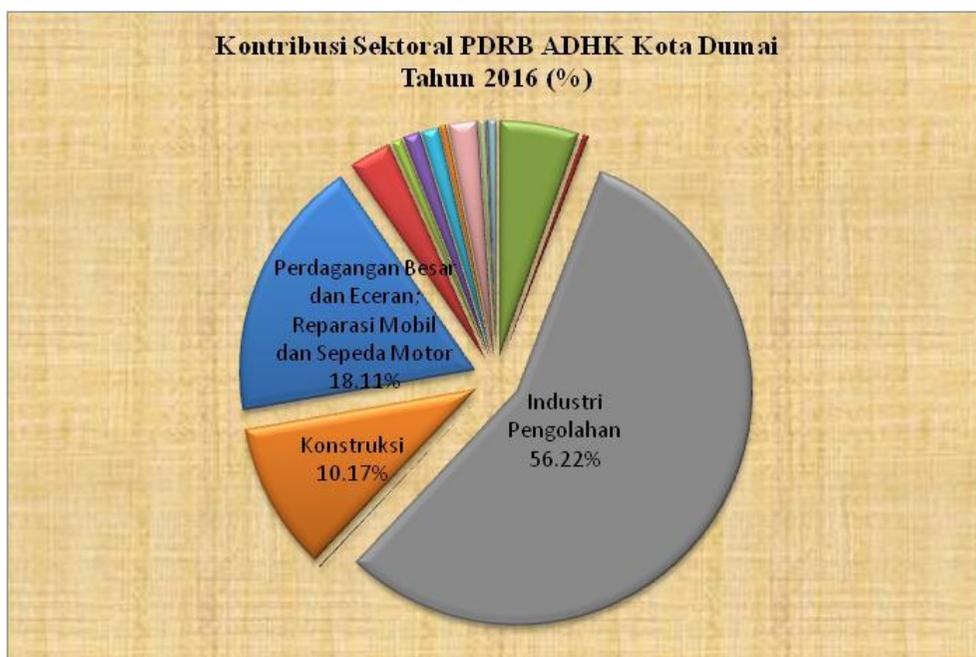
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

NO.	SEKTOR/SUB SEKTOR	NILAI PDRB ADHK 2010 (JUTA RUPIAH)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.131.619,66	1.119.969,79	1.138.071,39	1.139.159,31	1.152.198,89
2.	Pertambangan dan Penggalian	86.416,17	86.479,50	87.258,58	87.421,17	83.885,46
3.	Industri Pengolahan	10.035.476,89	10.414.550,79	11.059.234,35	11.357.155,83	12.069.822,54
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10.521,20	11.612,14	13.196,96	14.483,65	17.107,96
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.341,93	3.363,44	3.428,96	3.523,70	3.517,99
6.	Konstruksi	2.117.406,69	2.181.412,05	2.081.314,46	2.119.777,32	2.184.087,17
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.652.938,24	3.735.616,92	3.771.270,34	3.776.043,56	3.887.613,26
8.	Transportasi dan Pergudangan	503.239,11	537.461,38	590.801,20	602.752,39	632.138,13
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	123.319,23	134.378,76	146.744,72	150.191,31	154.066,50
10.	Informasi dan Komunikasi	170.547,14	206.134,11	229.294,86	245.697,40	255.850,29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	397.959,44	471.332,89	285.154,19	265.536,84	265.883,62
12.	Real Estate	83.055,84	86.988,13	90.248,56	94.773,07	96.113,61
13.	Jasa Perusahaan	831,69	883,50	958,60	1.032,15	1.069,38
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	412.483,99	419.717,32	421.465,77	429.988,77	430.683,13
15.	Jasa Pendidikan	78.210,66	82.520,25	89.917,60	94.631,35	95.277,88
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	26.531,16	28.650,41	29.384,74	32.305,65	32.586,29
17.	Jasa lainnya	75.946,65	84.596,52	94.630,46	102.020,06	106.501,69
PDRB ADHK		18.909.845,69	19.605.667,87	20.132.375,74	20.516.493,53	21.468.403,79

Sama seperti struktur pembentuk PDRB ADHB, dari tabel di atas terlihat bahwa tiga sektor utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB ADHK Kota Dumai berturut-turut adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi. Adapun besaran masing-masing kontribusi sektor tersebut seperti terlihat pada Grafik 4.5.

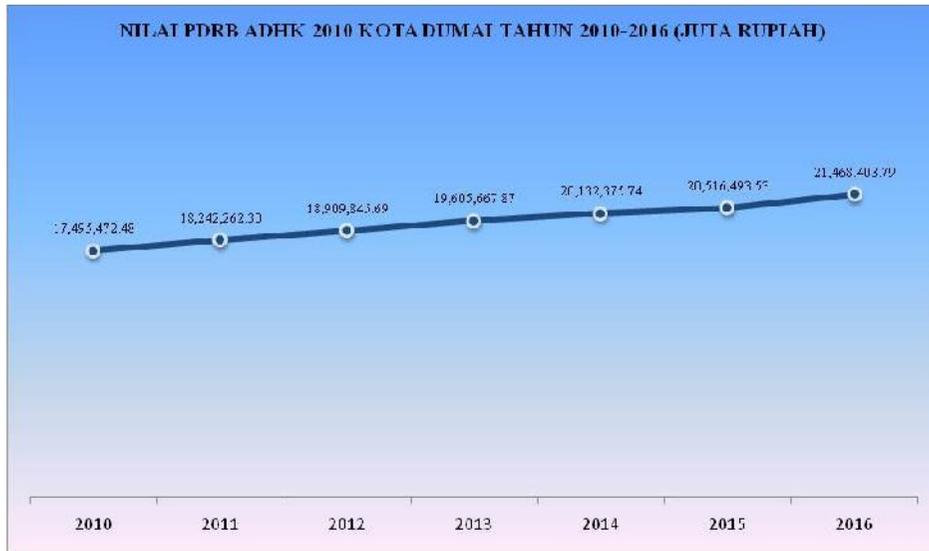
Grafik 4.5 Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai Tahun 2016

(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)



Dari Grafik di atas terlihat bahwa pada PDRB ADHK Kota Dumai tahun 2016 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya yaitu sebesar 56,22%. Dua sektor lain yang memberikan kontribusi besar selain sektor industri pengolahan adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

18,11% dan sektor konstruksi 10,17 %. Perkembangan nilai PDRB ADHK Kota Dumai tahun 2010-2016 dapat dilihat pada Grafik 4.6.



Grafik 4.6 Perkembangan Nilai PDRB ADHK Kota Dumai Tahun 2010-2016

(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PDRB ADHK ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) serta investasi yang dibutuhkan.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan penambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi

yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;
2. menyusun tipologi perkembangan wilayah (Tipologi Klassen);
3. sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan sektoral atau regional;
4. mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi;
5. sebagai dasar bagi perumusan kebutuhan investasi;
6. sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis dan target perekonomian wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016

(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

No	Sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi (r) Tahunan (%)					r Rata-rata (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,06	-1,03	1,62	0,10	1,14	0,45
2.	Pertambangan dan Penggalan	1,01	0,07	0,90	0,19	-4,04	-0,74
3.	Industri Pengolahan	2,70	3,78	6,19	2,69	6,28	4,72
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	10,37	13,65	9,75	18,12	12,92
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan	0,87	0,64	1,95	2,76	-0,16	1,29

BAB 4

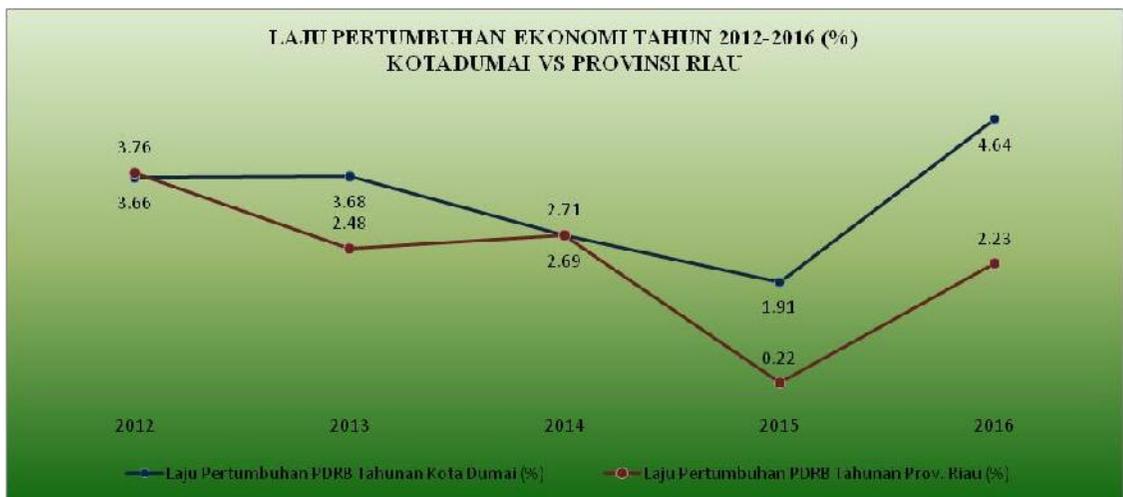
No	Sektor	Laju Pertumbuhan Ekonomi (r) Tahunan (%)					r Rata-rata (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
6.	Konstruksi	3,73	3,02	-4,59	1,85	3,03	0,78
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,08	2,26	0,95	0,13	2,95	1,57
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,94	6,80	9,92	2,02	4,88	5,87
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,20	8,97	9,20	2,35	2,58	5,72
10.	Informasi dan Komunikasi	17,88	20,87	11,24	7,15	4,13	10,67
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	36,21	18,44	-39,50	-6,88	0,13	-9,59
12.	Real Estate	1,59	4,73	3,75	5,01	1,41	3,72
13.	Jasa Perusahaan	7,68	6,23	8,50	7,67	3,61	6,49
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,60	1,75	0,42	2,02	0,16	1,09
15.	Jasa Pendidikan	4,35	5,51	8,96	5,24	0,68	5,06
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,60	7,99	2,56	9,94	0,87	5,27
17.	Jasa lainnya	5,54	11,39	11,86	7,81	4,39	8,82
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kota Dumai (%)	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64	3,22

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada 1 (satu) sektor ekonomi pun pada PDRB Kota Dumai yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Bahkan sektor industri pengolahan yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Dumai, pada tahun 2014 dapat dikatakan tidak tumbuh. Sektor industri pengolahan ini di tahun 2016 mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode 2012-2016, tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah laju pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor ini memiliki laju

BAB 4

pertumbuhan rata-rata selama periode 2012-2016 sebesar 4,72%. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata tertinggi selama periode 2012-2016 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 12,92%. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan, sektor ini mengalami perlambatan di tahun 2014 dan pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan tertinggi selama periode 2012-2016.

Secara umum, berdasarkan olahan data pada Tabel 4.6 terlihat bahwa perekonomian Kota Dumai terus mengalami perlambatan dari tahun 2013 sampai tahun 2015, kemudian akhirnya mengalami pertumbuhan sebesar 4,64% di tahun 2016. Selama periode 2012-2016, laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Dumai sebesar 3,22%, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Riau yaitu sebesar 1,91%. Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dengan Provinsi Riau selama periode 2012-2016 dapat dilihat pada Grafik 4.7.



Grafik 4.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2016 Kota Dumai VS Provinsi Riau
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

Dari Grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2012-2016 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, kecuali di tahun 2012 dan 2014. Meskipun demikian, secara umum perekonomiannya sama-sama mengalami perlambatan sebelum akhirnya mulai mengalami pertumbuhan kembali di tahun 2016. Di tahun 2015 perekonomian Kota Dumai dan Provinsi Riau mengalami titik pertumbuhan terendah atau dapat dikatakan perekonomiannya tidak tumbuh.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Analisis Kebutuhan Investasi

Muta'ali (2015) mengatakan bahwa ICOR adalah salah satu metode yang dikembangkan untuk menghubungkan faktor produksi atau pembentukan modal tetap PDRB dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan regional.. ICOR digunakan untuk menghitung besarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Menurut Susanti, dkk, 2007 faktor-faktor yang mempengaruhi ICOR antara lain (Muta'ali, 2015):

- 1) Komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi.
- 2) Laju pertumbuhan ekonomi.
- 3) Tingkat pendapatan per kapita suatu Negara.

Menurut Arsyad (1999), konsep ICOR ini penting karena ICOR dapat dipakai untuk menentukan laju pertumbuhan suatu perekonomian dan menguji konsistensi antara target pertumbuhan ekonomi dengan tambahan modal yang mungkin akan terkumpul dari tabungan investasi asing yang sedang berjalan (Muta'ali, 2015).

ICOR dihitung menggunakan PDRB ADHK menurut jenis pengeluaran dengan formulasi $ICOR = \Delta K_t / \Delta Y_t$, dimana:

ΔK_t : tambahan kapital (modal) atau investasi.

ΔY_t : perubahan output, yang dicerminkan oleh perubahan PDRB atau pertumbuhan ekonomi.

Dalam perencanaan ekonomi wilayah direncanakan tentang kebutuhan investasi untuk pembangunan wilayah. Konsep ICOR dijadikan sebagai dasar untuk menentukan besarnya investasi yang dibutuhkan oleh suatu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Tiga komponen utama yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya kebutuhan investasi atau tambahan modal setiap tahunnya yaitu:

- 1) Rasio tambahan capital dan output (ICOR) suatu sektor;
- 2) Target pertumbuhan sektor yang direncanakan; dan
- 3) Nilai tambah bruto (PDRB) sektor tahun sebelumnya.

Kebutuhan investasi dihitung dengan formulasi $I_t = ICOR \times r \times PDRB$, dimana:

ICOR : *Incremental Capital Output Ratio*.

r : tingkat pertumbuhan ekonomi.

PDRB : PDRB ADHK tahun-t.

Dari formulasi-formulasi diatas disimpulkan bahwa besar kecilnya ICOR berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi ICOR, maka semakin dibutuhkan banyak modal untuk mencapai tingkat pertambahan output wilayah atau pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dikarenakan umumnya target pertumbuhan ekonomi berada dalam batas tertentu, maka angka ICOR yang dianggap memiliki produktivitas investasi yang baik antara 3-4, karena jika semakin tinggi ICOR, maka semakin

mahal penciptaan output pada wilayah tersebut, karena dimungkinkan terjadinya indikasi inefisiensi dalam penggunaan investasi.

Nilai PDRB ADHK 2010 Kota Dumai Menurut Jenis Pengeluaran, ICOR dan Kebutuhan Investasi Kota Dumai tahun 2012-2016 berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

Tabel 4.7 PDRB ADHK 2010 Kota Dumai Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2012-2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

No.	Sektor	Nilai PDRB ADHK 2010 (Juta Rp)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	5.623.792,19	5.930.453,96	6.246.229,23	6.571.914,42	6.856.034,61
2.	Pengeluaran konsumsi LNPRT	69.786,85	73.739,06	84.089,25	85.761,01	89.279,03
3.	Pengeluaran konsumsi pemerintah	1.343.356,64	1.415.616,54	1.388.523,84	1.392.635,35	1.408.276,02
4.	Pembentukan modal tetap bruto	9.256.841,59	9.776.973,83	9.227.047,35	9.351.821,55	9.528.641,38
5.	Perubahan inventori	983.026,29	860.915,27	824.714,38	544.011,70	569.840,98
6.	Ekspor barang dan jasa	18.886.481,15	19.755.801,68	20.990.892,12	22.329.581,99	25.090.891,14
7.	Dikurangi impor barang dan jasa	17.262.439,01	18.207.832,49	18.629.120,45	19.759.232,49	22.074.559,37
	PDRB ADHK	18.909.845,70	19.605.667,85	20.132.375,72	20.516.493,53	21.468.559,37

Tabel 4.8 *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan Kebutuhan Investasi Kota Dumai Tahun 2012-2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

No.	Sektor	Nilai PDRB ADHK 2010 (Juta Rp)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pembentukan modal tetap bruto (%)	49,00	49,87	45,83	45,58	44,38
2.	Perubahan Stok (%)	5,20	4,39	4,10	2,65	2,65
3.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,66	3,68	2,69	1,91	4,64
4.	PDRB ADHK (juta Rp.)	18.909.845,70	19.605.667,85	20.132.375,72	20.516.493,53	21.468.559,37
	ICOR	14,81	14,75	18,58	25,28	10,14
	Investasi yang dibutuhkan (juta Rp)	1.024.886.788	1.063.788.910	1.005.176.173	989.583.325	1.009.848.236

Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang digunakan untuk mengetahui Grafik an tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya dan membandingkan PDRB perkapita wilayah dengan PDRB perkapita wilayah acuannya. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan seperti Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

dimana :

- r_i : laju perumbuhan PDRB Kabupaten/Kota i
- r : laju perumbuhan PDRB Provinsi
- Y_i : PDRB per kapita Kabupaten/Kota i
- Y : PDRB per kapita Provinsi

Tabel 4.10 Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi
Wilayah

Wilayah	PDRB (juta rupiah)		Jumlah Penduduk Tahun 2016	PDRB per kapita (Y) Tahun 2016	Laju pertumbuha n Ekonomi (r)
	2012	2016			
Kota Dumai	18.956.363	27.945.396	291.908	95.733.574	3,22
Provinsi Riau	558.492.72 5	682.351.09 2	6.500.971	104.961.41 1	1,91

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kota Dumai masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat**, karena memiliki pendapatan per kapita (Y_i) lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan perkapita Provinsi Riau (Y), tetapi memiliki laju pertumbuhan ekonomi (r_i) lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (r).

Selain digunakan untuk mengklasifikasikan potensi perkembangan perekonomian wilayah, Analisis Tipologi Klassen juga dapat digunakan untuk klasifikasi sektor ekonomi.

Analisis Sektor Basis

Teori basis ekonomi dimaksudkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor pembangunan yang termasuk sektor basis maupun non basis pada suatu daerah. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non-basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor basis merupakan penggerak utama dalam perekonomian suatu wilayah. Adapun metode yang paling banyak digunakan dalam penentuan kegiatan basis dan non-basis serta sektor unggulan adalah: (1) Metode *Location Quotient* (LQ); (2) Metode *Dynamic Location Quotient* (DLQ); dan (3) Metode *Shift Share* (SS). Data dasar yang digunakan adalah PDRB ADHK.

Indek Kontribusi Sektoral

Muta'ali (2015) menyatakan bahwa konsep paling sederhana untuk mengGrafik kan kemampuan sektor basis adalah Indek Kontribusi Sektoral dalam PDRB, yaitu dengan cara melihat besar kecilnya kontribusi sektor tertentu terhadap perekonomian wilayah. Indek kontribusi sektoral digunakan untuk melihat rasio

nilai PDRB tiap sektor terhadap nilai PDRB total. Nilai indeks kontribusi sektoral antara 0-1, semakin mendekati 1 maka kontribusi/peran sektor tersebut dalam perekonomian wilayah semakin besar dan dominan sehingga berpotensi menjadi sektor andalan atau basis.

Tabel 4.11. Potensi Sektor Andalan/Basis Kota Dumai
Tahun 2012-2016

No.	Sektor	Indek Kontribusi Sektoral				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	0,53	0,53	0,55	0,55	0,56
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Konstruksi	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10.	Informasi dan Komunikasi	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
12.	Real Estate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
15.	Jasa Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jasa lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2012-2016, sektor industri pengolahan mempunyai nilai Indeks Kontribusi Sektoral di atas 0,53, artinya sektor industri pengolahan ini memiliki peranan yang besar dalam perekonomian wilayah sehingga berpotensi untuk menjadi sektor andalan.

Analisis Location Quotient (LQ)

Teknik analisis ini digunakan untuk menentukan sektor apa saja yang merupakan sektor basis dalam perekonomian wilayah dengan cara membandingkan antara peran relatif sektor atau subsektor wilayah (PDRB sektoral) terhadap nilai tambah total wilayah (PDRB) dengan peranan relatif sektor atau subsektor yang sama pada wilayah yang lebih luas. Analisis LQ selalu dikaitkan dengan dua hal yang saling berhubungan yaitu penafsirannya untuk mengidentifikasi sektor basis/unggulan dan tingkat spesialisasi sektor/ komoditas tertentu, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12 Penafsiran Nilai LQ
(Sumber: Muta'ali, 2015)

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis / Unggulan / Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
LQ > 1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ < 1	Sektor non- basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ = 1	Sektor	Spesialisasi	Non eksport,

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis / Unggulan / Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
	seimbang dengan wilayah acuan	sama dengan wilayah acuan	hanya mampu melayani pasar di dalam wilayah

LQ dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/R_{vj}}{X_i/R_v}$$

dimana :

LQ_{ij} : indeks/koeffisien LQ sektor i di Kab/Kota j

X_{ij} : PDRB sektor i di Kab/Kota j

X_i : PDRB sektor i di Provinsi acuan

R_{vj} : Total PDRB Kab/Kota j

R_v : Total PDRB Provinsi acuan

Hasil analisis LQ sektor-sektor ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.13 Nilai LQ Sektor-Sektor Ekonomi Kota Dumai
Tahun 2012-2016

(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

No.	Sektor	Nilai LQ				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,26	0,24	0,23	0,23	0,22
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3.	Industri Pengolahan	2,08	2,00	2,01	1,96	1,94
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,22	1,29	1,34	1,32	1,34
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,25	1,24	1,25	1,23	1,21
6.	Konstruksi	1,64	1,63	1,43	1,35	1,29
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,36	2,26	2,19	2,13	2,04
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,65	3,61	3,67	3,50	3,48
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,58	1,61	1,64	1,62	1,58
10.	Informasi dan Komunikasi	1,30	1,40	1,48	1,45	1,41
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,44	2,60	1,50	1,37	1,27
12.	Real Estate	0,56	0,55	0,54	0,52	0,50
13.	Jasa Perusahaan	1,05	1,02	0,98	0,96	0,95
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,23	1,20	1,19	1,14	1,12
15.	Jasa Pendidikan	0,95	0,95	0,98	0,95	0,93
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,93	0,88	0,86	0,84
17.	Jasa lainnya	1,13	1,14	1,15	1,10	1,06

Berdasarkan hasil analisis LQ di atas, maka penafsiran sektor basis di Kota Dumai terlihat pada Table 4.14 dan Tabel 4.15.

Tabel 4.14 Penafsiran Sektor Basis Kota Dumai Tahun 2012-2013
 Berdasarkan Analisis LQ
 (Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

Nilai LQ	Penafsiran			Sektor
	Sektor Basis / Unggulan / Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar	
LQ > 1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pengolahan - Pengadaan listrik dan gas - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang - Konstruksi - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor - Transportasi dan pergudangan - Penyediaan akomodasi dan makan minum - Informasi dan komunikasi - Jasa keuangan dan asuransi - Jasa perusahaan - Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib - Jasa lainnya
LQ < 1	Sektor non-basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, kehutanan dan perikanan - Pertambangan dan penggalian - Real estate - Jasa pendidikan - Jasa kesehatan dan kegiatan social
LQ = 1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama dengan wilayah acuan	Non eksport, hanya mampu melayani pasar di dalam wilayah	

Tabel 4.15 Penafsiran Sektor Basis Kota Dumai Tahun 2014-2016
Berdasarkan Analisis LQ
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

Nilai LQ	Penafsiran			Sektor
	Sektor Basis / Unggulan / Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar	
LQ > 1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pengolahan - Pengadaan listrik dan gas - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang - Konstruksi - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor - Transportasi dan pergudangan - Penyediaan akomodasi dan makan minum - Informasi dan komunikasi - Jasa keuangan dan asuransi - Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib - Jasa lainnya
LQ < 1	Sektor non-basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, kehutanan dan perikanan - Pertambangan dan penggalian - Real estate - Jasa perusahaan - Jasa pendidikan - Jasa kesehatan dan kegiatan social
LQ = 1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama dengan wilayah acuan	Non eksport, hanya mampu melayani pasar di dalam wilayah	

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Analisis DLQ pada prinsipnya sama dengan LQ. Perbedaannya hanya mengintroduksikan laju pertumbuhan masing-masing sektor dengan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri dalam kurun waktu tertentu. Adapun penafsiran nilai DLQ sebagai berikut:

DLQ > 1 : Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab/Kota lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi. Sektor i prospektif dan masih diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang.

DLQ < 1 : Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab/Kota lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi. Sektor i tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang.

DLQ = 1 : Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab/Kota sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi.

DLQ dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$DLQ_{ij} = \frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)}$$

dimana :

DLQ_{ij} : indeks DLQ

g_{ij} : rata-rata laju pertumbuhan sektor/subsektor i di Kab/Kota

g_j : rata-rata laju pertumbuhan di Kab/Kota

G_i : rata-rata laju pertumbuhan sektor/subsektor i di tingkat Provinsi

G : rata-rata laju pertumbuhan di tingkat Provinsi

Tabel 4.16 Nilai DLQ Sektor-sektor Ekonomi Kota Dumai Tahun 2012-2016

(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

No.	Sektor	Nilai DLQ				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,20	0,00	0,37	0,32	0,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	-4,82	-0,23	-0,45	-0,08	0,54
3.	Industri Pengolahan	0,48	0,45	1,09	0,34	0,74
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,24	2,11	1,42	0,42	0,75
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,02	0,74	1,44	0,46	0,87
6.	Konstruksi	1,03	0,82	-0,38	0,16	0,39
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,35	0,37	0,40	0,19	0,39
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,00	0,75	1,22	0,20	0,83
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,37	1,07	1,29	0,49	0,49
10.	Informasi dan Komunikasi	1,15	1,37	1,85	0,42	0,49
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,63	1,34	-6,52	-1,83	0,10
12.	Real Estate	0,31	0,56	0,75	0,27	0,55
13.	Jasa Perusahaan	0,71	0,54	0,69	0,42	0,72
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	0,50	0,56	0,24	0,95
15.	Jasa Pendidikan	1,02	0,94	1,45	0,36	0,57
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,70	0,38	0,42	0,69
17.	Jasa lainnya	0,64	0,89	1,07	0,33	0,42

Tabel 4.17 Penafsiran Sektor Basis Kota Dumai Tahun 2012-2016
Berdasarkan Nilai DLQ
(Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

Nilai DLQ	Penafsiran	Sektor Ekonomi
DLQ > 1	Sektor prospektif dan masih diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang	<p>Tahun 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan listrik dan gas - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang - Konstruksi - Penyediaan akomodasi dan makan minum - Informasi dan komunikasi - Jasa keuangan dan asuransi - Jasa pendidikan <p>Tahun 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan listrik dan gas - Penyediaan akomodasi dan makan minum - Informasi dan komunikasi - Jasa keuangan dan asuransi <p>Tahun 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri pengolahan - Pengadaan listrik dan gas - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang - Transportasi dan pergudangan - Penyediaan akomodasi dan makan minum - Informasi dan komunikasi - Jasa pendidikan - Jasa lainnya
DLQ < 1	Sektor i tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang.	<p>Tahun 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, kehutanan dan perikanan - Pertambangan dan penggalan

BAB 4

Nilai DLQ	Penafsiran	Sektor Ekonomi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri pengolahan - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor - Transportasi dan pergudangan - Real estate - Jasa perusahaan - Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib - Jasa kesehatan dan kegiatan social - Jasa lainnya <p>Tahun 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, kehutanan dan perikanan - Pertambangan dan penggalian - Industri pengolahan - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang - Konstruksi - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor - Transportasi dan pergudangan - Real estate - Jasa perusahaan - Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib - Jasa pendidikan - Jasa kesehatan dan kegiatan social - Jasa lainnya <p>Tahun 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, kehutanan dan perikanan - Pertambangan dan penggalian - Konstruksi - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan

BAB 4

Nilai DLQ	Penafsiran	Sektor Ekonomi
		<p>sepeda motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa keuangan dan asuransi - Real estate - Jasa perusahaan - Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib - Jasa kesehatan dan kegiatan social <p>Tahun 2015 dan Tahun 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, kehutanan dan perikanan - Pertambangan dan penggalian - Industri pengolahan - Pengadaan listrik dan gas - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang - Konstruksi - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor - Transportasi dan pergudangan - Penyediaan akomodasi dan makan minum - Informasi dan komunikasi - Jasa keuangan dan asuransi - Real estate - Jasa perusahaan - Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib - Jasa pendidikan - Jasa kesehatan dan kegiatan social - Jasa lainnya
DLQ = 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab/Kota sebanding dengan laju pertumbuhan	

Nilai DLQ	Penafsiran	Sektor Ekonomi
	sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi	

Analisis Gabungan LQ dan DLQ

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui terjadinya pergeseran dan reposisi serta menilai prospek keberadaan sektor ekonomi wilayah pada masa mendatang. Dengan kriteria yang melekat pada analisis LQ dan DLQ maka dapat disusun tabel silang tipologi prospek pengembangan basis ekonomi wilayah seperti terlihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18 Tipologi Sektor Berdasarkan Nilai LQ dan DLQ
 Sumber: Muta’ali, 2015

	DLQ > 1	DLQ < 1
LQ > 1	Tipe I Sektor Basis, Prospektif	Tipe II Sektor Basis, Tidak Prospektif
LQ < 1	Tipe III Sektor Non-basis, Prospektif	Tipe IV Sektor Non-basis, Tidak Prospektif

Berdasarkan analisis LQ dan DLQ yang telah dilakukan sebelumnya, berikut terlihat hasil analisis gabungan LQ dan DLQ sektor-sektor ekonomi Kota Dumai.

Tabel 4.19 Analisis Gabungan LQ dan DLQ Kota Dumai Tahun 2012-2016
 (Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah)

	DLQ > 1	DLQ < 1
LQ > 1	- Pertanian	

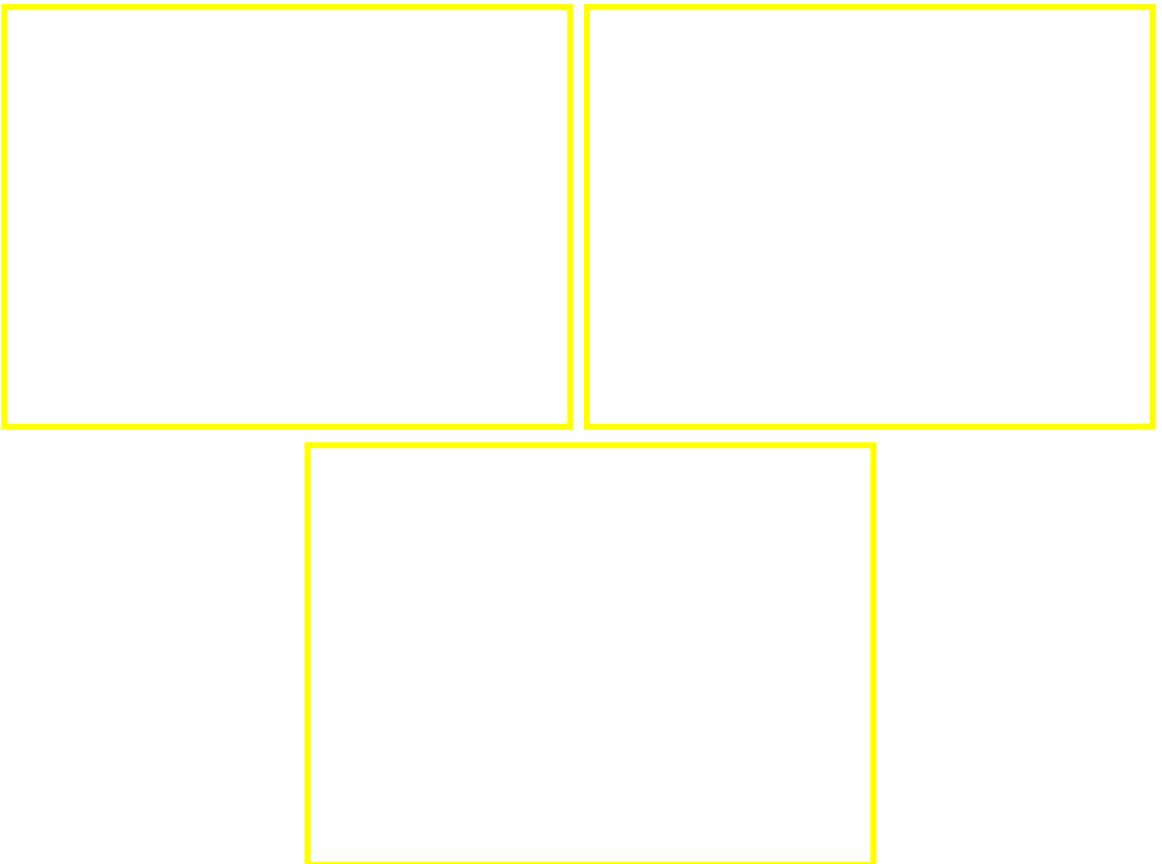
BAB 4

	DLQ > 1	DLQ < 1
	<ul style="list-style-type: none">- Industri pengolahan- Listrik Gas dan Air Minum	
LQ < 1	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan- Jasa-jasa	<ul style="list-style-type: none">- Pertambangan dan penggalian- Perdagangan- Angkutan dan perhubungan- Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan hasil analisis gabungan LQ dan DLQ, sektor basis dan prospektif di Kota Dumai adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor listrik, gas dan air minum.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA



SARANA DAN PRASARANA

Kehidupan masyarakat suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pelayanan yang mampu mendukung aktivitas masyarakat baik aktivitas ekonomi, sosial maupun fasilitas umum. Fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya, sedangkan untuk fasilitas pelayanan aktivitas ekonomi biasa dipengaruhi kebutuhan pasar dan tidak selalu tersedia di setiap tempat (muta'ali, 2015). Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan pemukiman untuk mendukung aktivitas masyarakat sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana pencapaian pelayanan publik mampu disediakan oleh pemerintah daerah.

Untuk melihat ketersediaan layanan fasilitas pemukiman tersebut, dapat digunakan standard pelayanan minimum pelayanan fasilitas pemukiman Indonesia yang tertuang dalam SNI 03-1773-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan.

FASILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

Menurut SNI 03-1773-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan, dijelaskan bahwa dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal.

Sesuai dengan SNI 03-1773-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan, maka kriteria penentuan fasilitas pelayanan lingkungan permukiman bidang pendidikan diantaranya:

Tabel 5.1. Kriteria Penentuan Fasilitas Pelayanan Lingkungan Permukiman Bidang Pendidikan

No	Jenis fasilitas	Treshold penduduk (jiwa)	Radius jangkauan (m)
1.	Taman kanak-kanak (TK)	1.250	500
2.	Sekolah dasar (SD)	1.600	1.000
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.800	1.000
4.	Sekolah Menengah atas (SMA)	4.800	3.000

Sumber: SNI 03-1773-2004



BAB 5

Berdasarkan SNI 03-1773-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan, jika dilihat dari threshold jumlah penduduk, maka dapat kita ketahui jumlah TK, SD, SMP, SMA yang harus tersedia disetiap kecamatan dikota Dumai

Tabel 5.2. Kecukupan fasilitas Sekolah Dasar di Kota Dumai berdasarkan SNI 03-1773-2004

No	Kecamatan	Luas wilayah Draft RTRW (Km ²)	2016 (Jiwa)	Jumlah sekolah eksisting	Treshold Jumlah Penduduk	Jumlah Sekolah minimal	Kurang
1	Bukit Kapur	338.32	44,447	17	1,600	28	11
2	Medang Kampai	143.6	11,701	8	1,600	7	-1
3	Sungai Sembilan	1,425.61	31,860	18	1,600	20	2
4	Dumai Barat	35.13	41,479	10	1,600	26	16
5	Dumai Selatan	65.01	52,645	14	1,600	33	19
6	Dumai Timur	34.76	62,932	27	1,600	39	12
7	Dumai Kota	4.31	46,844	9	1,600	29	20
	Total	2,046.74	291,908	103		182	79

Tabel 5.3. Kecukupan fasilitas Sekolah Menengah Pertama di Kota Dumai
berdasarkan SNI 03-1773-2004

No	Kecamatan	Luas wilayah Draft RTRW (Km ²)	2016 (Jiwa)	Jumlah sekolah eksisting	Treshold Jumlah Penduduk	Jumlah Sekolah minimal	Kurang
1	Bukit Kapur	338.32	44,447	6	4,800	9	3
2	Medang Kampai	143.6	11,701	2	4,800	2	0
3	Sungai Sembilan	1,425.61	31,860	4	4,800	7	3
4	Dumai Barat	35.13	41,479	4	4,800	9	5
5	Dumai Selatan	65.01	52,645	7	4,800	11	4
6	Dumai Timur	34.76	62,932	7	4,800	13	6
7	Dumai Kota	4.31	46,844	4	4,800	10	6
	Total	2,046.74	291,908	34		61	27

Tabel 5.4. Kecukupan fasilitas Sekolah Menengah Atas di Kota Dumai
berdasarkan SNI 03-1773-2004

No	Kecamatan	Luas wilayah Draft RTRW (Km ²)	2016 (Jiwa)	Jumlah sekolah eksisting	Treshold Jumlah Penduduk	Jumlah Sekolah minimal	Kurang
1	Bukit Kapur	338.32	44,447	2	4,800	9	7
2	Medang Kampai	143.6	11,701	1	4,800	2	1
3	Sungai Sembilan	1,425.61	31,860	2	4,800	7	5
4	Dumai Barat	35.13	41,479	2	4,800	9	7
5	Dumai Selatan	65.01	52,645	9	4,800	11	2
6	Dumai Timur	34.76	62,932	4	4,800	13	9
7	Dumai Kota	4.31	46,844	3	4,800	10	7
	Total	2,046.74	291,908	23		61	38

Jika diperhatikan ketiga tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan SNI 03-1773-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan maka berdasarkan jumlah penduduk terdapat kekurangan jumlah sekolah dasar sebanyak 84 sekolah dasar pada tahun 2016 yang tersebar di seluruh kecamatan dikota Dumai kecuali kecamatan medan kampai. Adapun kecamatan yang paling banyak kekurangan sekolah dasar adalah kecamatan dumai timur sebanyak 31 sekolah dasar.

Sedangkan untuk sekolah menengah pertama, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2016 kota Dumai kekurangan sekolah menengah pertama sebanyak 30 sekolah menengah pertama. Adapun kecamatan yang paling banyak kekurangan adalah kecamatan dumai timur sebanyak 9 sekolah menengah pertama.

Untuk sekolah menengah atas, berdasarkan jumlah penduduk maka pada tahun 2016 kota Dumai kekurangan 38 sekolah menengah atas. Adapun kecamatan yang paling banyak kekurangan sekolah menengah atas adalah kecamatan dumai timur sebanyak 9 sekolah menengah atas.

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Menurut SNI 03-1773-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan, Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana

tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Sesuai dengan SNI 03-1773-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan, maka kriteria penentuan fasilitas pelayanan lingkungan permukiman bidang kesehatan diantaranya:

Tabel 5.5 Kriteria Penentuan Fasilitas Pelayanan Lingkungan Permukiman Bidang Kesehatan

No	Jenis fasilitas	Treshold penduduk (jiwa)	Radius jangkauan (m)
1.	Posyandu	1.250	500
2.	Rumah Sakit	240.000	
3.	Puskesmas	120.000	3.000
4.	Puskesmas Pembantu	30.000	1.500

Sumber: SNI 03-1773-2004

Berdasarkan SNI 03-1773-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan, jika dilihat dari trehshold jumlah penduduk, maka dapat kita ketahui jumlah jumlah posyandu, Rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu yang harus tersedia dikota Dumai.

Tabel 5.6 Kecukupan fasilitas Kesehatan di Kota Dumai berdasarkan SNI 03-1773-2004

Uraian	Rumah Sakit	Posyandu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Jumlah Penduduk Kota Dumai tahun 2015 = 291.908				
Treshold Penduduk	240,000	1,250	120,000	30,000
Jumlah Existing	3	194	10	13
Jumlah minimal	1	234	2	10
Selisih	2	-40	8	3

Jika diperhatikan ketiga tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan SNI 03-1773-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan maka berdasarkan jumlah penduduk maka dapat kita lihat bahwa fasilitas Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota Dumai sudah melebihi jumlah minimal yang harus tersedia. Sedangkan untuk posyandu, pada tahun 2016, kota Dumai masih kekurangan posyandu sebanyak 40 posyandu.

DATA DAN INFORMASI KOTA DUMAI 2012 - 2016



DATA DAN INFORMASI KOTA DUMAI 2012 - 2016



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017, Dumai Dalam Angka 2017
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017, Kecamatan Dalam Angka 2017
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017, Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai menurut lapangan usaha Tahun 2012-2016
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017, Produk Domestik Regional Bruto Kota Dumai menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016
- Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2017, Statistik Daerah Kota Dumai Tahun 2017
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2017, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau menurut pengeluaran Tahun 2012-2016
- Muta'ali, Lutfi, 2015, Teknik Analisis Regional Untuk perencanaan Wiayah, Tata Ruang dan Lingkungan
- Pemerintah Kota Dumai, 2016, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021